

**PENGARUH INVESTASI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2021**

SKRIPSI

Disusun sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Ahyar Manarul Hidayat Fatah

1605026097

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An.Saudara Ahyar Manarul Hidayat Fatah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahyar Manarul hidayat Fatah

NIM : 1605036097

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2018-2021**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum dan saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Dr. Ratno Agrivanto, M.Si.
NIP. 198001282008011010

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing II


Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 198607312019031008



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Prof.Dr.Hamka Kampus III NgaliyanTelp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi@walisongo .ac.id

PENGESAHAN

Nama : Ahyar Manarul Hidayat Fatah
NIM : 1605026097
Jurusan : S1 Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal 22 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Mardhiyaturrositaningsih, ME
NIP. 19930311 201903 2 020
Penguji I

Ana Zahrotun Nihayah, M.A.
NIP. 19890708 201903 2 018
Pembimbing I

Pembimbing I

Dr. Rango Agriyanto, M.Si.
NIP. 19800128 200801 1 010

Semarang, 22 Desember 2022
Sekertaris Sidang

Rahmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 19860731 201903 1 008
Penguji II

Cita Sary Dja'akum, MEI.
NIP. 19820422 201503 2 004
Pembimbing II

Pembimbing II

Rahmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 19860731 201903 1 008

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-3538/Un.10.5/D.1/PP.00.9/10/2021

11 Oktober 2021

Lamp. : -

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :

Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahyar Manarul Hidayat Fatah
NIM : 1605026097
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/I Rakhmat Dwi Pambudi, MSI
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

(Q.S Adz-Dzariyat 51:19)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Saya persembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya hormati,

Bapak Abdul Hadi dan Ibu Mimin

Beliau adalah orang tua yang begitu berjasa dalam hidup saya. Terima kasih untuk segenap doa dan dukungan yang tiada hentinya kalian panjatkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kepada Bapak dan Ibu, Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kerendahan hati. Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021," tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain melainkan karya saya sendiri. Demikian juga pendapat atau karya orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dirujuk atau dikutip berdasarkan referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022

Deklarator



Ahyar Manarul Hidayat Fatah

NIM 1605026097

ABSTRACT

Poverty reduction is a major challenge for provinces in Indonesia. The same thing also happened to Central Java province which has not been able to escape the problem of poverty. This study aims to determine the effect of investment, Human Development Index, and the Regional Minimum Wage on the poverty rate in Central Java Province in 2018-2021.

This study used a quantitative method with the Eviews application as a data analysis tool. The data used is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics. The research method used panel data regression with the selected model Fixed Effect Model.

The results of the research are that investment has positive and insignificant effect on the poverty rate in Central Java Province in 2018-2021. The Human Development Index has a negative and significant effect on the poverty rate in Central Java Province in 2018-2021. The Regional Minimum Wage has a positive and significant effect on the poverty rate in Central Java Province in 2018-2021. And the three, investment, Human Development Index, and Regional Minimum Wage, simultaneously affect the poverty rate in Central Java in 2018-2021.

Keywords: Poverty, Investment, Human Development Index, Regional Minimum Wage, and Central Java.

ABSTRAK

Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan besar bagi provinsi-provinsi di Indonesia. Begitu pula Provinsi Jawa Tengah yang belum bisa lepas dari masalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan perhitungan memakai aplikasi Eviews. Data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode penelitian memakai regresi data panel dengan model terpilih Fixed Effect Model.

Adapun hasil penelitian yaitu investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021. Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021. Serta ketiganya, investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional, secara bersama-sama berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2018-2021.

Kata Kunci : Kemiskinan, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, dan Jawa Tengah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayahNya. Serta kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini berjudul “PENGARUH INVESTASI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2021”. Tugas akhir skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis pada penelitian ini sangat menyadari dalam penyusunan skripsi ini dapat terelesaikan berkat bantuan, arahan, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa dari berbagai banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof . Dr. H. Imam Tufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag, selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II dalam Penulisan ini.
5. Bapak Abdul Hadi dan Ibu Mimin, selaku orang tua saya yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material.

6. Bapak Alm. Tusdi dan Ibu Kusriah, selaku mertua yang turut serta memberi dukungan kepada penulis.
7. Nur Ifani Hayatun Nisa, Istri penulis, Perempuan pendamping hidup yang selalu setia menemani dan mendukung penuh perjuangan penulis.
8. In Nurul Inayah, Wagyo, Lilis Laela komariah, Hamdan, Nyai Nina Nur Hikmah, Alya Zafiroh, merupakan saudara penulis yang selalu memberi dukungan baik moral maupun material.
9. Segenap keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berperan penting pada penulis.
10. Teman-teman EIC 16, LPM Invest, PMII, IMKS, dan teman-teman saya yang tidak bisa menyebutnya satu persatu terimakasih telah memberikan semangat serta kebersamaannya selama ini.
11. Kepada semua pihak yang terlibat tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang dapat membangun demi penyempurnaan tugas akhir skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat mempunyai manfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Desember 2022

Penulis



Ahyar Manarul Hidayat Fatah

NIM 1605026097

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	9
2.1 Kemiskinan.....	9
2.1.1 Pengertian Kemiskinan	9

2.1.2	Jenis-jenis Kemiskinan Menurut Para Ahli.....	11
2.1.3	Kemiskinan dalam Perspektif Islam.....	14
2.2	Investasi.....	18
2.2.1	Pengertian Investasi	18
2.2.2	Ruang Lingkup Investasi.....	19
2.2.3	Pasar dan Transaksi Investasi	20
2.2.4	Sumber Investasi	22
2.2.5	Investasi Dalam Islam	23
2.2.6	Hubungan Investasi dan Kemiskinan.....	26
2.3	Indeks Pembangunan Manusia	27
2.3.1	Pengertian Indeks Pembangunan Manusia.....	27
2.3.2	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Islam	29
2.3.3	Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan.....	31
2.4	Upah Minimum Regional	32
2.4.1	Pengertian Upah Minimum Regional	32
2.4.2	Upah Minimum Regional Dalam Islam	34
2.4.3	Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Kemiskinan	34
2.5	Penelitian Terdahulu.....	36
2.6	Kerangka Teoritik.....	38
2.7	Hipotesis Penelitian	38
BAB III Metode Penelitian		41
3.1	Jenis dan Sumber Data	41
3.2	Populasi dan Sampel	41
3.3	Metode Pengumpulan Data	42
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	43

3.4	Teknik Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN.....		52
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1	Kemiskinan di Jawa Tengah	52
4.1.2	Investasi di Jawa Tengah	54
4.1.3	Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah	55
4.1.4	Upah Minimum Regional di Jawa Tengah.....	56
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	57
4.2.1	Pemilihan model Estimasi regresi data panel.....	57
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	61
4.2.3	Uji Ketetapan Model.....	62
4.2.4	Hasil Analisis Regresi Data Panel	65
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
BAB V KESIMPULAN & SARAN		74
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN.....		84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2021.....	3
Tabel 2 Penelitian terdahulu.....	38
Tabel 3 Sampel Penelitian.....	42
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Common Effect Model (CEM)	57
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Fixed Effect Model (FEM).....	58
Tabel 6 Uji Chow	58
Tabel 7 Hasil Uji Regresi Random Effect Model (REM).....	60
Tabel 8 Uji Hausman	60
Tabel 9 Hasil Uji Multikoleniaritas	62
Tabel 10 Hasil Uji F.....	63
Tabel 11 Hasil Uji Koefisien determinasi.....	64
Tabel 12 Hasil Uji Regresi data panel Fixed Effect Model	65
Tabel 13 Uji T.....	66
Tabel 14 Presentase total investasi 10 besar kabupaten/kota di Jawa Tengah.....	70
Tabel 15 Perbandingan Pekerja Sektor Formal dan Informal di Jawa Tengah (Persen).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Presentase Kemiskinan Indonesia 2012-2021	2
Gambar 2 Kemiskinan Jawa Tengah (%) tahun 2018-2021	3
Gambar 3 Kerangka Teoritis	38
Gambar 4 Presentase tingkat kemiskinan provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021	53
Gambar 5 Realisasi investasi Jawa Tengah 2018-2021	54
Gambar 6 IPM Jawa Tengah.....	55
Gambar 7 UMR Jawa Tengah.....	56
Gambar 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 tabulasi data	84
Lampiran 2 Hasil Uji Regresi Common Effect Model (CEM)	88
Lampiran 3 Hasil Uji Regresi Fixed Effect Model (FEM)	88
Lampiran 4 Uji Chow	89
Lampiran 5 Hasil Uji Regresi Random Effect Model	89
Lampiran 6 Uji Hausman	90
Lampiran 7 Hasil Heterokedastisitas	90
Lampiran 8 Hasil Uji Multikoleniaritas	91
Lampiran 9 Hasil Uji F	91
Lampiran 10 Hasil Uji F	91
Lampiran 11 Uji T	92
Lampiran 12 Hasil Uji Regresi data panel Fixed Effect Model	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, kemiskinan sudah lama menduduki pos prioritas pembangunan. Komitmen ini tersurat dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sependapat dengan ini adalah Siswono Yudo Husodo, mengutarakan Indonesia dikemas sebagai negara *welfare state*. Artinya, dalam hal kesejahteraan warga, negara menempatkan diri sebagai penjamin pemenuhan standar minimum.¹

Sebagai contoh, Pasal 27 UUD 1945 memuat Aspirasi bangsa untuk menjamin hak warganya dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak. Disusul Pasal 31 yang menjamin pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia. Adapun regulasi lain yang mendukung ada di Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kedua pasal ini menekankan pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Namun, saat ini Indonesia masih perlu berjalan jauh untuk sampai pada garis finish cita-cita UUD 1945. Banyak problem belum berhasil dipecahkan, lebih-lebih dalam hal kemiskinan. Angka kemiskinan semakin melonjak dan sulit untuk dihilangkan.

Kemiskinan juga tercatat menjadi hajat utama dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *No poverty* yang diusung SDGs² dapat dilihat dari hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN menyasar kemiskinan di poin 7-8 persen pada akhir 2019.³ Tapi realisasinya belum memenuhi harapan, yaitu baru mampu menurunkan

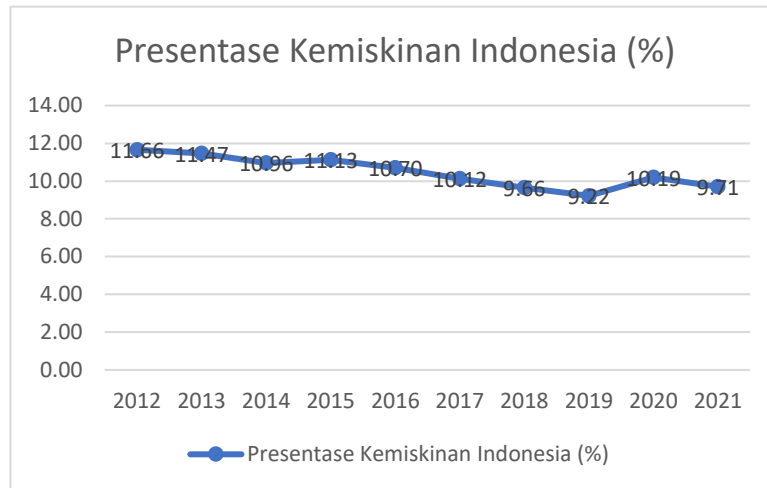
¹ Oarmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, "Mimpi Negara Kesejahteraan", (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006), hal. xv.

² Dinar Melani Hutajulu, Yustirania Septiani, and Jesika Melina Simamora, "Analisis Variabel Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 108, <https://doi.org/10.24269/iso.v5i1.636>. h. 109

³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), "EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2015-2019," 2017., h. 23

angka kemiskinan di angka 9,22 persen. Data ini menjadi gejala belum optimalnya upaya pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan.

Berikut adalah grafik kemiskinan Indonesia pada 2012-2021.⁴



Gambar 1 Presentase Kemiskinan Indonesia 2012-2021

Mengutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), Secara umum pada periode September 2012 – September 2021, terlihat adanya penurunan angka kemiskinan kecuali di tahun 2020. Tahun 2020 menjadi korban dampak pandemic Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian masyarakat untuk berdaya sehingga stabilitas ekonomi Indonesia terguncang.

Tidak hanya menjadi persoalan di level nasional, kemiskinan perlu dientaskan mulai dari skala ekonomi lokal yaitu tingkat daerah. Pemerintah daerah harus membuat formula kebijakan yang sesuai untuk menciptakan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memberdayakan diri.⁵

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi penyumbang angka kemiskinan tertinggi yaitu 11,25 persen, Angka tersebut setara dengan 4109,75

⁴Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah”, bps.go.id, diakses 24/11/2022

⁵ Jaka Sriyana, “Reducing Regional Poverty Rate in Central Java,” *Jejak 11*, no. 1 (2018): 1–11, <https://doi.org/10.15294/jejak.v1i1i1.13272>. H.2

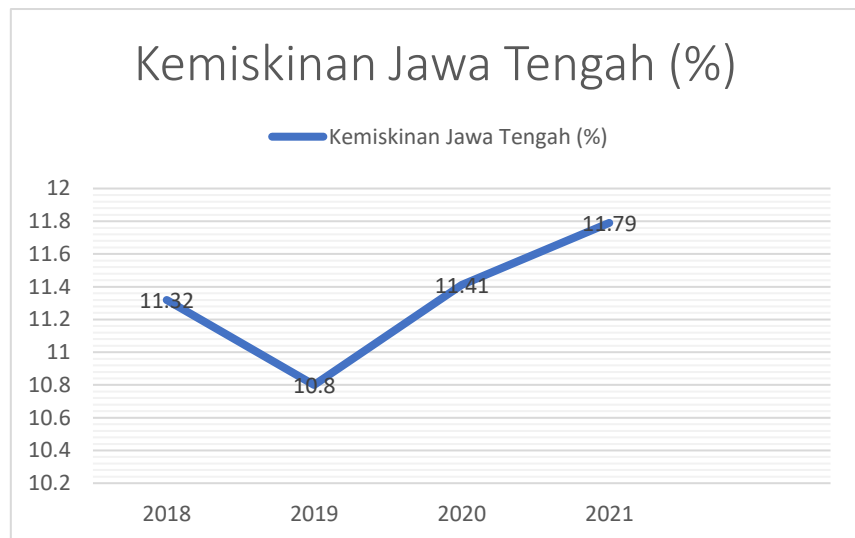
ribu penduduk. Berikut adalah tabel jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2021.

Provinsi	Jumlah Kemiskinan (Ribuan Jiwa)
Jawa Timur	4572,73
Jawa Barat	4195,34
Jawa Tengah	4109,75
Banten	867,23
Yogyakarta	506,43
Dki Jakarta	501,92

Tabel 1 jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2021

Sumber: BPS.go.id (diolah)

Kemiskinan di Jawa Tengah melebihi angka 10 persen sehingga masuk dalam kategori *hardcore poverty*. Dapat dikatakan kemiskinan *hardcore* apabila level kemiskinan lebih dari 10 persen. Dalam grafik berikut ini terlihat jelas bahwa dalam kurun waktu 4 tahun angka kemiskinan masih di atas 10 persen.



Gambar 2 Kemiskinan Jawa Tengah (%) tahun 2018-2021

Sumber: bps.go.id

Faktanya, ada banyak penyebab kemiskinan di luar faktor ekonomi. Ada faktor pendapatan dan non pendapatan, Pendidikan, dan kemudahan mengakses infrastruktur dasar. Hal tersebut dijelaskan oleh Sriyana (2018), yang menganggap karakteristik manusia, pendidikan, dan kemampuan mengakses infrastruktur dasar sebagai faktor penting kemiskinan. Faktor non pendapatan yang dimaksud adalah Pendidikan dan lingkungan keluarga, dimana keluarga yang berpenghasilan rendah menjadi pemicu kemiskinan disbanding faktor ekonomi lainnya.⁶ Dalam hal ini, penulis akan meneliti bab kemiskinan menggunakan tiga variabel yaitu Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, serta Upah Minimum Regional. Adapun periode yang digunakan yaitu pada 2018-2021.

Variabel investasi diperlukan dalam menekan kemiskinan di Jawa Tengah dan bertindak sebagai instrumen modernisasi, pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, dan masih banyak lagi. Merujuk dari Sutawijaya (2007), dijelaskan bahwa dalam teori klasik investasi diposisikan sebagai pengeluaran untuk meningkatkan produksi. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah menambah celah investasi ke berbagai daerah untuk pembangunan ekonomi.

Dilansir dari laman dpmpptsp.jatengprov.go.id, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaporkan kinerja pada 2021 bahwa nilai investasi Jawa Tengah sebesar 52,71 Triliun rupiah dengan realisasi 98,5 persen dari target yang ditetapkan. Jika dilihat dari laporan tahun lalu ada peningkatan sebesar 2,47 Triliun rupiah atau 4,92 persen.

Menilik penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asmara, dkk⁷ memberikan kesimpulan bahwa di Jawa Timur tidak ada pengaruhnya antara investasi dan kemiskinan. Berbanding halnya dengan penelitian milik Yasa, dkk⁸ di wilayah Serbagita Bali dengan hasil investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

⁶ Sriyana.

⁷ Amelia Sestu Rahajeng, Sri Muljaningsih, and Kiky Asmara, "Engaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 5 (2021).

⁸ Gusti Ayu Putu Ambara Ratih, Made Suyana Utama, and I Nyoman Mahaendra Yasa, "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional

Kemiskinan adalah permasalahan yang erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, sehingga yang perlu mendapat perhatian yaitu kualitas manusianya. Dalam mengukur kualitas manusia dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apabila hasil IPM rendah maka produktivitas kerja juga rendah dan sebaliknya populasi penduduk miskin tinggi.

Banyak studi yang membahas tentang IPM dan pengangguran salah satunya yaitu dilakukan oleh Suliswanto⁹ dengan judul “*Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*” memperoleh hasil IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain¹⁰ di Aceh timur berakhir pada kesimpulan yang menyatakan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah dari tahun 2012-2021 terus mengalami kemajuan. Pada 2012 IPM menduduki angka 67,21 dan naik menjadi 72,16 pada 2021. Per tahunnya dapat dirata-rata mengalami pertumbuhan 0,80 persen. Namun adanya pandemi pada tahun 2020 membuat IPM hanya naik 0,20 persen atau 0,14 poin. Sangat jauh dari IPM periode 2018-2019 yaitu 0,61 poin.

Permasalahan kemiskinan juga tidak dapat terlepas dari birokrasi pemerintah terkait upah minimum regional. Kebijakan tersebut sangatlah memengaruhi distribusi pendapatan. Guna menganalisis kebijakan pemerintah maka penelitian ini menggunakan indikator upah minimum regional.

UMR Jawa Tengah terus mengalami kenaikan, tahun 2020 sebesar Rp1.742.015 mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 3,27 persen yaitu menjadi Rp1.798.979. Namun UMR ini tidak merata di setiap daerah, Semarang

Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 6, no. 1 (2017): 29–54.

⁹ Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, “Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia,” 2010.

¹⁰ Muhammad Zulkarnain Mukarramah, Cindy Yolanda, “Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur,” *Jurnal Samudra Ekonomika* 3, no. 2 (2019).

masih menduduki angka tertinggi yaitu sebesar Rp2.810.025 dan terendah ada di Banjarnegara yaitu Rp1.805.000.¹¹

Studi pendahuluan yang mengupas dampak upah minimum terhadap kemiskinan di antaranya dilakukan oleh Indrasari, dkk.¹² Kesimpulan akhir yang diperoleh adalah upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan pada kemiskinan tahun 2006-2014. Beda halnya dengan Ningrum¹³ yang menarik kesimpulan bahwa hasil penelitiannya menyatakan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2011-2015.

Dari fakta-fakta di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pengaruh pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021.**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021?
- b. Apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021?
- c. Apakah terdapat pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021?

¹¹ “Upah Minimum Provinsi (UMP) Indonesia 2020 - Gajimu.Com,” n.d.

¹² Ardhan Kurniawati, Beni Teguh Gunawan, and Disty Putri Ratna Indrasari, “Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014,” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen* 17, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.17970/jrem.17.170207.ID>.

¹³ Shinta Setya Ningrum, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15, no. 2 (2017).

- d. Apakah terdapat pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia, serta upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah yang dirumuskan maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021.
- b. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021.
- c. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021.
- d. Untuk mengetahui pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia, serta upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

- a. Untuk penulis: penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan intelektual dalam melakukan penelitian baik secara teori maupun praktik di lapangan.
- b. Untuk UIN Walisongo Semarang: penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- c. Untuk pihak lain: penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan rujukan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait permasalahan serupa di tempat yang berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini memaparkan latar belakang penelitian. Selain itu juga memuat tentang rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan deskripsi singkat mengenai sistematika penulisan.

Bab II. Kerangka Teoritis.

Bab ini mencakup kerangka teori dan hipotesis. Kerangka Teoritis menguraikan variabel-variabel pada penelitian ini dan penjabaran singkat penelitian terdahulu yang menjadi patokan pada penelitian ini, kerangka berpikir dan hipotesis. Variabel bebasnya ialah Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional, sedangkan variabel terikatnya adalah Tingkat Kemiskinan.

Bab III. Metode Penelitian.

Bab ini berisikan penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, pengukuran, serta teknik analisis data.

Bab IV. Pembahasan.

Pada bab ini memuat uraian mengenai tingkat kemiskinan dan data hasil temuan dari Badan Pusat Statistik. Selain itu, bab ini juga memaparkan proses analisis data dan pembahasan dari hasil analisis data tersebut.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran penulis.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan ialah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai barang maupun jasa serta kebutuhan dasar seorang tersebut baik papan, sandang, dan pangan belum terpenuhi.¹⁴ Ketiadaan kepemilikan di sini yang dimaksud adalah tidak mampu memenuhi minimal memiliki kehidupan yang layak.

Jumlah masyarakat miskin dapat diukur menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan menjadi media yang dipakai sebagai pengukur angka kemiskinan atau penyekat seseorang dikatakan miskin atau tidak.¹⁵ Dengan kata lain, penduduk dikatakan miskin apabila pengeluaran perkapita perbulannya di bawah garis kemiskinan.¹⁶ Garis kemiskinan ini didefinisikan beragam yaitu menggunakan pendekatan US\$1 atau US\$2 hingga pendapatan yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi 2100 kalori per orang.¹⁷

Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan *basic need approach* dengan indikator *Head Count Index (HCI)*. Perhitungan Indikator ini menggunakan jumlah dan presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.¹⁸

¹⁴ A Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=b8hEDwAAQBAJ>.

¹⁵ A Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Atas kerja sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h.7

¹⁶ Richard L.H Tumilaar Lavenia Kotambunan, Sutomo Wim Palar, "Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 01 (2016): 925–33.

¹⁷ Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. H. 7

¹⁸ D Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan* (Jaka: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). H. 15

Pengeluaran dijadikan sebagai alat ukur pendapatan apakah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga atas komoditas minimum yang ada. Selanjutnya akan ditentukan ukuran kebutuhan minimum dan jumlahnya dikali harga komoditas. Angka tersebut yang dipakai untuk membagi garis kemiskinan (*poverty line*) di tengah penduduk.¹⁹

Garis kemiskinan terbagi menjadi dua yaitu dengan tolak ukur makanan (GKM), dimana dalam pemenuhan makanan minimum 2100 kalori per penduduk setiap hari. Kedua yakni Garis Kemiskinan non Makanan (GKNM), dimana penentuannya dihitung dari kebutuhan di luar konsumsi seperti perumahan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya..²⁰

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = garis kemiskinan

GKM = Garis kemiskinan makanan

GKNM = Garis kemiskinan non makanan.

Perbedaan harga komoditas di setiap daerah memungkinkan adanya garis kemiskinan berbeda. Ketika ditarik kesimpulan, garis kemiskinan yaitu kurangnya individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, dikatakan sebagai penduduk miskin pada saat pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan.²¹

Kemiskinan sudah menjadi polemik lama, permasalahan ini bukan hanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan melainkan juga minimnya materi atau ilmu yang dimiliki.²² Bahkan ada sebagian yang tidak

¹⁹ Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*.

²⁰ Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*. H. 15

²¹ Lavenia Kotambunan, Sutomo Wim Palar, "Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014)."

²² Nano Prawoto et al., "Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 9, no. 1 (2009): 56–68.

merasakan fasilitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, transportasi, dan hal-hal lainnya yang mempermudah mobilisasi.

Golongan yang dikategorikan miskin haruslah mendapat kebijaksanaan khusus terutama aspek primer seperti pengetahuan dan bekal keterampilan. Sedangkan aspek sekunder berkaitan dengan jaringan sosial, Pendidikan, jaminan gizi, air bersih, kesehatan, dan lainnya.²³ Sharp (dalam Mudrajad Kuncoro, 2001) menjabarkan tiga faktor yang memicu adanya kemiskinan yaitu, 1) distribusi pendapatan yang semakin ada kesenjangan. 2) adanya diferensiasi kualitas SDM sehingga produktivitas rendah upahpun rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, deskriminasi fisik maupun keturunan. 3) yang mendapat akses modal hanya kalangan yang sudah kaya tentunya memiliki jaminan sertifikat tanah, kendaraan dan barang berharga lainnya.²⁴

2.1.2 Jenis-jenis Kemiskinan Menurut Para Ahli

Suharto (2006 : 148-149) menggolongkan kemiskinan menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Kelompok yang paling miskin (*destitute*)

Kelompok ini bisa dikatakan paling miskin bahkan sulit mendapat akses ke berbagai pelayanan sosial.

b. Kelompok miskin (*poor*).

kelompok ini miskin tapi lebih layak hidup dan masih memiliki akses untuk pelayanan sosial.

c. Kelompok rentan (*vulnerable grup*).

Kelompok rentan dapat diklasifikasikan tidak miskin tapi ketika terjadi krisis ekonomi maka akses sosialnya sedikit diabaikan dan sulit mendapat pertolongan sosial.²⁵

²³ Yulianto Kadji, "Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya" 113, no. 2 (2004): 180–90.

²⁴ Whisnu Adhi Saputra, "Tingkat Kemiskinan," *Ekonomi Dan Bisnis*, 2011, 1–77, <http://eprints.undip.ac.id/28982/1/Skripsi018.pdf>.

²⁵ Mukarramah, Cindy Yolanda, "Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur."

Ruang lingkup kemiskinan juga bersifat kompleks. Karena itu para ahli membaginya menjadi tiga golongan (Harniati, 2010), sebagai berikut :

- a. Kemiskinan alamiah, kemiskinan ini berdasarkan kualitas manusia dan alam yang rendah. Jika masyarakatnya sebagian besar di sektor pertanian, biasanya iklim yang tidak menentu akan menyebabkan gagal panen. Hal ini juga akan mempengaruhi proses produksi menjadi rendah. Bahkan belum seluruhnya pertanian di Indonesia sudah mendapatkan irigasi, kebanyakan masih mengandalkan hujan alami atau disebut sawah tadah hujan tentu akan menghambat proses pertanian ketika musim kemarau panjang. Ketika masalah ini tidak teratasi maka hasil produksi selalu rendah meskipun tanah subur.
- b. Kemiskinan kultural, kemiskinan ini murni karena masyarakat enggan memperbaiki taraf hidupnya walau ada pihak lain yang membantunya.
- c. Kemiskinan struktural, kemiskinan ini disebabkan karena kebijakan tatanan kelembagaan yang berubah menyebabkan masyarakat sulit untuk akses transportasi misalnya dan infrastruktur lainnya. Keterbatasan akses semakin membuat kemiskinan mengakar bahkan turun temurun.

Ketiga jenis kemiskinan tersebut penyebabnya tidaklah tunggal. Ada yang murni dari alam seperti yang terjadi pada kemiskinan kultural, ada yang karena kualitas manusia yang kurang mendapat akses pendidikan dan akses umum lainnya, ada juga karena tatanan kelembagaan negara seperti yang terjadi pada kemiskinan struktural. Dalam kemiskinan struktural ada beberapa karakteristik yaitu yang miskin akan semakin miskin dan sebaliknya, hal ini disebabkan karena mobilisasi tidak dapat berjalan secara vertikal dan termasuk lamban. Misal saja pendidikan, biayanya yang mahal akan membuat masyarakat miskin semakin sulit untuk menjangkau pendidikan. Ketika kebutuhan pokok pendidikan tidak mampu tercapai maka masyarakat akan sulit untuk terbebas dari kemiskinan.

Adapun pembagian kategori kemiskinan dalam perspektif lain dijelaskan oleh Nurkse, 1953 dalam Mudrajat Kuncoro, (1997) yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Disebut miskin absolut ketika penghasilan terletak di bawah garis kemiskinan, yang mana kebutuhan pribadinya bahkan belum mampu tercukupi. Skema ini dipergunakan untuk memutuskan tingkat pendapatan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Kendala yang ditemukan tidak jauh dari keadaan maju tidaknya suatu negara.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diperuntukkan untuk masyarakat yang telah mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Namun masih belum layak dibanding masyarakat lainnya. Konsep ini cenderung dinamis karena sewaktu-waktu berubah ketika pola hidup masyarakat juga berubah. Konsep ini dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial, semakin jauh jarak kesenjangan sosial maka kategori masyarakat miskin semakin tinggi.

3. Kemiskinan Kultural

Miskin kultural artinya kondisi ketidakmampuan yang disebabkan oleh orang atau kelompok masyarakat itu sendiri. Mereka tidak memiliki kemauan untuk berusaha memperbaiki taraf hidupnya, walaupun ada upaya dari pihak lain yang membantunya.²⁶

Badan Pusat Statistik membagi kemiskinan menjadi beberapa kelas, dengan menggunakan besaran pengeluaran per orang per bulan sebagai dasar acuan.²⁷

²⁶ I Maipita, *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan* (Absolute Media, 2013). H. 33

²⁷ B M Titioka, *Kemiskinan Di Kota Ambon* (Jakarta Barat: Penerbit Adab, 2021). H. 22

1. Disebut tidak miskin ketika per bulan pengeluarannya Rp. 350.610 per orang
2. Hampir tidak miskin ketika individu pengeluarannya sekisar Rp 280.488 sampai Rp 350.610 per bulan
3. Hampir miskin ketika pengeluaran di bawah 280.000 per orang.
4. Miskin ketika pengeluaran per bulannya berada di bawah Rp. 233.270 per orang.
5. Sangat miskin jika pengeluarannya per bulan tidak menentu dan jauh dari yang sudah dijabarkan di atas.

2.1.3 Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, miskin berasal dari bahasa Arab yang berarti kefakiran yang sangat. Istilah itu tersurat dalam firman-Nya Surah al-Balad ayat 16:

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“...atau orang miskin yang sangat fakir” (QS al-Balad [90]: 16).

Perihal kata ‘fakir’ juga berpangkal dari bahasa Arab: al-faqr, diterjemahkan sebagai ‘membutuhkan’ (*al-ihtiyaj*). Allah SWT berfirman:

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

“...lalu dia berdoa, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku” (QS al-Qashash [28]:24).

Syekh An-Nabhani mendefinisikan fakir sebagai orang yang memiliki harta (uang), tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan pembelanjanya. Nidzamul Iqtishadi fil Islam membatasi Orang miskin sebagai orang yang tidak memiliki harta (uang) serta tidak mendapatkan penghasilan. Klasifikasi ini berguna untuk menguraikan dua ruang mustahiq zakat, pertama *al-fuqara* (orang-orang fakir) dan kedua *al masakiin* (orang-orang miskin).

Dalam QS at-Taubah [9]:60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Kefakiran dan kemiskinan sejatinya merupakan sebuah fenomena. Dimana walaupun dilihat dari kacamata manapun harus mempunyai definisi yang realistis. Namun peradaban sistem ekonomi Kapitalis memandang kemiskinan dengan perspektif yang beragam. Mereka mengartikan kemiskinan sebagai ketidakberdayaan dalam pemenuhan kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Kemajuan dan perkembangan produk barang dan jasa berbanding lurus dengan berkembangnya kebutuhan manusia. Pendapat demikian berlaku pula dalam hal pemenuhan kebutuhan atas barang dan jasa tersebut

Sistem kapitalis tidak mempunyai pertegasan yang pasti dan lebih dinamis atas standar kemiskinan/kefakiran. Sebagai contoh, banyak negara di benua Eropa dan Amerika yang menganggap pemenuhan kebutuhan sekunder menjadi wajib agar seseorang tidak dikategorikan miskin. Dalam waktu bersamaan, di Sudan, Bangladesh Irak, misalnya, orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sekundernya, belum bisa dikatakan fakir/miskin.

Di sisi lain, fenomena kefakiran/kemiskinan dinilai oleh Islam sebagai persoalan yang sama. Islam tidak mempunyai barometer yang berbeda dalam mengkategorikan kemiskinan di belahan dunia manapun. Cara kerja penyelesaian soal kemiskinan dari sisi islam pun serupa.

Hukum-hukumnya *fixed*, tidak berganti dan tidak bergeser pengaplikasiannya dari satu negara ke negara yang lain.²⁸

Kemiskinan dipandang sebagai masalah yang universal oleh Islam, fakta yang dijumpai manusia, tidak peduli ia muslim ataupun non muslim. Kebutuhan primer diatur oleh Syariat Islam sebagai kebutuhan yang berpaut pada eksistensi manusia. Dan dibagi menjadi tiga hal pokok, antara lain, pangan, dan papan.

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَلَا يُضَارُّونَ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf...” (QS al-Baqarah [2]:233).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتِمُوهُنَّ لِأَوْلَادِكُمْ بِرِزْقِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْعُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu...” (QS ath-Thalaaq[65]:6).

Rasulullah SAW Bersabda “Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan”(HR Ibnu Majah).

Dari ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa keberlangsungan eksistensi dan kehormatan manusia ditentukan oleh tiga hal pokok yang menjadi kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan). Ketika tiga hal ini belum tercukupi, ada kemungkinan berimbas pada kerusakan atau kemunduran (eksistensi) umat manusia itu sendiri. Pengelompokan ini sebagai acuan untuk setiap program pemulihan ekonomi. Kemiskinan juga

²⁸ Sri Budi Cantika, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2014): 101, <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>.

berubah bentuk menjadi ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan, sebagaimana firman Allah SWT:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan” (QS al- Baqarah[2]:268).

Parameter untuk menyebutkan individu bida tergolong miskin atau tidak dari sudut pandang Islam terdiri dari tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti yang sudah dijelaskan di atas. Adapun kacamata sitem yang lain umumnya hanya mengukur pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.²⁹

Terdapat beberapa kata yang melukiskan kemiskinan dalam Al-Qur’an, antara lain “*faqir, miskin al-sail, dan al-mahrum*”. Namun dari empat kata tersebut, dua kata pertama lah yang paling dominan. Dalam Al-Qur’an kita dapat menjumpai kata fakir sebanyak 12 kali dan kata miskin sebanyak 25 kali.³⁰

Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda perihal fakir dan miskin. Paham pertama mengutarakan bahwa dua golongan itu pada hakikatnya adalah sama. Paham ini dikemukakan oleh Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim pengikut Imam Malik. Di sisi lain, sebagian besar ulama mempunyai anggapan yang berbeda. Opini yang kedua meyakini bahwa fakir dan miskin sejatinya berbeda kelompok namun masih satu macam. Baik kelompok fakir maupun miskin berada pada situasi kekurangan dalam kebutuhan. Di sisi lain, para ahli fikih dan ahli tafsir juga berbeda pendapat. Yusuf al-Qardhawi mengibaratkan kedua kata tersebut seperti Iman dan Islam, keduanya adalah satu kesatuan tetapi mempunya

²⁹ Cantika.

³⁰ A M Ridwan, *Geliat konomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* (UIN-Maliki Press, 2011).

arti sendiri-sendiri. Masing-masing mempunyai arti buat kata lain yang sejajar.³¹

Kemiskinan dalam Islam melekat sebagai satu hal yang membahayakan. Berbahaya bagi kesehatan berpikir, ahlak, keluarga, bahkan masyarakat. Kemiskinan adalah musibah dan bencana yang mengharuskan diri mengharap suka kepada Allah dari kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Apabila kemiskinan semakin mewabah, akan berpotensi mempengaruhi diri menjadi lupa akan adanya Allah serta rasa sosial pada sesama.³²

2.2 Investasi

2.2.1 Pengertian Investasi

Investasi adalah pemutaran dana yang bermaksud mendapatkan pengembalian atau keuntungan dari hasil dana tersebut dalam jangka waktu satu periode. Investasi juga bisa diterjemahkan menjadi penanaman modal suatu perusahaan guna membeli barang pelengkap produksi.³³

Sunariyah (2003) yang dikutip oleh Yolanda, mengartikan Investasi sebagai bentuk modal yang ditanam dalam jangka Panjang dan diharapkan memberi keuntungan di waktu mendatang. Penanaman modal tersebut menjadi komponen kedua dalam pengeluaran agregat. Tabungan yang dilakukan oleh sektor rumah tangga akan mengalir ke perusahaan untuk diputar, ketika perusahaan menggunakan modal tersebut untuk membeli barang-modal dalam pengeluarannya maka disebut investasi.³⁴

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 511.

³² NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2018): 169–88, <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>.

³³ S.E.M.M. Dr. Wastam Wahyu Hidayat, *KONSEP DASAR INVESTASI DAN PASAR MODAL* (uwais inspirasi indonesia, n.d.), https://books.google.co.id/books?id=%5C_lbzDwAAQBAJ.

³⁴ YOLANDA - PATEDA, Vecky A.J. Masinambow, and Tri Oldy Rotinsulu, "Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di

Berdasarkan waktunya, investasi dikelompokkan menjadi dua yaitu jangka panjang dan pendek. Sedangkan pembagian berdasarkan kebutuhannya yaitu ada di sektor pemenuhan kebutuhan primer sekunder, Pendidikan, kesehatan dan untuk spekulasi.³⁵

2.2.2 Ruang Lingkup Investasi

a. Sekuritas

Sekuritas adalah nama dokumen atau sertifikat sebagai tanda hak pemodal dalam mendapatkan bagian dari kekayaan suatu organisasi atau perusahaan. Terdapat beberapa jenis sekuritas yang diperdagangkan di BEI, yakni:

a) Saham

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.³⁶ Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Keuntungan dalam saham disebut dividen dan *capital gain*.

b) Obligasi

Obligasi merupakan istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor/pemegang obligasi tersebut.³⁷ Dalam Ekonomi Islam istilah obligasi dikenal dengan nama sukuk.

Gorontalo,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 3 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.35794/jpek.d.16455.19.3.2017>.

³⁵ Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal* (uwais inspirasi indonesia, n.d.).

³⁶ Indra Sulistiana, *PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA*, *Jurnal Akuntansi* i. Vol 4 No. 2 Juli 2017: 65-74, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/252/314>.

³⁷ Muhammad Kamal Zubair, “*OBLIGASI DAN SUKUK DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM (Suatu Kajian Perbandingan)*,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*

c) Sertifikat Right

Sertifikat Right merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu.

d) Waran

Waran merupakan hak untuk membeli saham ataupun obligasi dengan harga tertentu yang ditentukan oleh emiten dalam jangka waktu tertentu.³⁸

b. Pasar Sekuritas

Penjual dan pembeli sekuritas dipertemukan dalam sebuah wadah yang disebut pasar sekuritas. Pasar ini memfasilitasi aset keuangan bagi kedua belah pihak tersebut.

c. Perantara Keuangan (*Financial Intermediaries*)

Merupakan lembaga keuangan yang menjual aset keuangannya sendiri, kemudian hasil penjualan tersebut untuk membeli aset keuangan yang lainnya. Imbalan yang diperoleh yaitu berupa uang tunai.

Dalam proses investasi, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam sekuritas salah satunya yaitu sekuritas mana yang dipilih, berapa banyak, jangka waktu yang dipilih, dan kapan mulai melakukan investasi. Berikut Langkah-langkah proses ketika melakukan investasi:

1. Menentukan kebijakan investasi
2. Analisis sekuritas
3. Pembentukan portofolio
4. Melakukan revisi portofolio
5. Evaluasi kinerja portofolio

2.2.3 Pasar dan Transaksi Investasi

a. Pasar Efek

Vol. 46 No. I, Januari-Juni2012 271-296
.http://www.asysyirah.uinsuka.com/index.php/AS/article/viewFile/40/40.

³⁸Muhamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Gelora Aksara Pratama: 2006). h.46.

Pasar efek (*Securities Market*) adalah sebuah pasar yang di dalamnya terdapat mekanisme penjualan dan pembelian sekuritas. Terdapat dua jenis pasar sekuritas, yaitu:

- a) Pertama, pasar uang atau *Money Market*. Pasar ini pada umumnya diperjualbelikan dalam jangka pendek (kegiatan perbankan).
 - b) Kedua pasar modal *Capital Market*, bisa termasuk pasar perdana dan sekunder dimana transaksi ini dilakukan tujuannya jangka panjang. Contohnya adalah saham dan obligasi.
- b. Bursa Efek
- Bursa Efek (*Securities Exchange*) menjadi lembaga sentral yang kegiatan penawaran dan perminataannya berdasarkan hasil lelang berdasarkan aturan tertentu. Tujuannya yaitu agar mendapat harga terendah dalam pembelian dan sebaliknya, mendapat harga tertinggi dalam penjualan.
- c. Bursa *Option* dan Bursa *Futures*
- a) *Option* adalah sebuah proses yang memperbolehkan pemegangnya untuk membeli atau menjual asset finansial yang dimiliki di bursa efek tertentu dengan catatan sudah melalui proses pendaftaran terlebih dahulu.
 - b) *Futures* adalah bentuk penyerahan kontrak pembelian atas suatu komoditi, valuta asing atau instrument finansial dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu di berbagai bursa efek.
- d. Pasar *Over The Counter* (OTC)
- OTC Market adalah sebuah cara dalam penjualan efek. Pasar OTC ini berupa jaringan telekomunikasi yang mempertemukan penjual dan pembeli.
- e. Pengaturan Pasar Efek
- Peraturan perundang-undangan tentang pasar efek dikeluarkan untuk menjamin keterbukaan dan keakuratan informasi yang diperoleh investor. Ada penindakan hukuman bagi yang menyalahgunakan dan misrepresentasi. Aturan pembentukan Lembaga seperti BAPEPAM dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berfungsi untuk mengakkan hukum dan

penyelenggara transaksi. Sedangkan pasar efek dibagi menjadi dua berdasarkan transaksinya yaitu *bull market* dan *bear market*.

2.2.4 Sumber Investasi

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) adalah sebuah tindakan guna menjalankan usaha dengan menanamkan modal di dalam negeri. PMDN ini dapat dilakukan oleh siapapun mulai dari BUMN, Perseorangan warga negara Indonesia, sampai pemerintah.³⁹

Secara umum, sektor apapun dapat digarap oleh PMDN akan tetapi ada pengecualian seperti sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan dan rahasia negara. Selebihnya dapat diambil alih oleh swasta untuk penanaman modalnya. Ada empat faktor yang mempengaruhi arus investasi di PMDN yaitu:⁴⁰

- a. Potensi dan karakteristik suatu daerah
- b. Budaya masyarakat
- c. Peta politik daerah dan nasional
- d. Ketelitian pemda dalam mengambil keputusan atau kebijakan sehingga mampu mewujudkan iklim yang mendukung dunia bisnis dan investasi.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Undang-undang Penanaman Modal lahir sebagai aturan yang membatasi Penanaman modal Asing (PMA). Hal ini termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. “*Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk*

³⁹ Firdausi Nuritasari, “Pengaruh Infrastruktur, Pmdn Dan Pma Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia,” *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 4 (2013): 456–67, <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3213>. H. 47

⁴⁰ Rowland B. F. Pasaribu, “Investasi Dan Penanaman Modal,” *Investasi Dan Penanaman Modal*, no. 36 (2010): 235–78, <http://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/07-investasi-dan-penanaman-modal.pdf>. 236

melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya tau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

PMA ini wujudnya beragam, mulai dari membangun sampai membeli dan atau mengakuisisi perusahaan.⁴¹ Aliran PMA dibagi menjadi dua yaitu dapat dilakukan secara langsung maupun melalui portofolio.⁴² Lembaga yang menaungi masalah PMA adalah Badan Koordinasi penanam modal (BKPM), dengan tugas memberi persetujuan atau tidak terhadap pihak asing yang hendak menanamkan modal.

PMA sifatnya jangka Panjang dan banyak memberi sumbangasih untuk negara terutama berkaitan dengan teknologi, manajemen, sampai perluasan lapangan kerja. Berikut ulasan sekilas terkait fungsi modal asing bagi Indonesia:⁴³

1. Bisa digunakan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Membantu proses industrialisasi
3. Membantu penyerapan tenaga kerja
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Berperan sebagai modal untuk perbaikan struktural

Di luar kelebihanannya, ternyata masih banyak kendala yang membuat investor asing ragu untuk menanamkan modal. Salah satu yang menjadi faktor pertimbangannya yaitu jaminan keamanan, status politik, kepastian hukum serta otonomi daerah.

2.2.5 Investasi Dalam Islam

Merujuk dari Dzajuli (2006), bahwa investasi termasuk pada fikih muamalah. Dalam fikih muamalah terdapat suatu kaidah yang berbunyi

⁴¹ Pasaribu. h. 237

⁴² Nuritasari, “Pengaruh Infrastruktur, Pmdn Dan Pma Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia.” h. 47

⁴³ Pasaribu, “Investasi Dan Penanaman Modal.” H. 239

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Dari aturan ini, tercermin cara agama Islam melindungi dan menjaga hak semua pihak. Ajaran islam juga membatasi agar pihak-pihak berkepentingan tidak menzalimi satu sama lain. Investor dituntut untuk mematuhi aturan dan batasan investasi dalam Islam, baik itu dari segi objek investasti maupun proses, tujuan, dan dampaknya.⁴⁴

Investasi dalam Al-Qur’an disinggung dalam QS. al-Baqarah [2]:
261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Ayat di atas mengandung informasi akan perlunya investasi. Tersirat di dalamnya bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah orang yang beruntung. Orang yang kemampuan finansialnya baik dan mau berinfak dengan cara memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui usaha produktif, sejatinya telah membatu banyak orang.

Ayat lain yang berkaitan dengan investasi yaitu dalam QS. An-Nisa:9

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنذَرُوا آلَهُمْ قُلُوبُهُمْ مُخَفَّفَةٌ لِّئَلَّا يُخَافُوا أَن يُحَافُوا لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَدْ بَرَأْنَا لِلْإِنسَانِ إِذْ فَطَرْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْنَاهُمْ فَنَنْبِئُهُم بِأَقْوَابِهِمْ وَأَنَّهُمْ لِيَوْمَئِذٍ لَّعِينُونَ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

⁴⁴ Elif Pardiansyah, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

Surah an-Nisa ayat 9 di atas mengandung perintah untuk tidak meninggalkan anak maupun keturunannya dalam keadaan lemah, baik itu lemah secara moril ataupun lemah secara materil. Ayat tersebut juga menyiratkan nasihat kepada manusia untuk memperkuat keadaan ekonominya. Salah satu caranya bisa melalui investasi jangka panjang. Investasi jenis ini menjadi alternatif untuk diwariskan kepada keturunannya sampai mereka mampu berusaha secara mandiri.

Jika dikulik dari sejarah Nabi Saw. Sebenarnya praktik investasi telah beliau lakukan. Nabi saw. Memulai perjalanan karirnya sejak usia 12 tahun. Beliau menjalani magang atau *internship* kepada pamannya untuk berdagang ke syiria. Masa muda Nabi Muhammad Saw pernah dipercaya untuk mengelola perdagangan milik seorang investor dengan memperoleh imbalan dalam bentuk umta. Lebih lanjut, karir profesional Rasulullah berlanjut dengan dipercaya mengelola dana dari investor, dalam hal ini para janda kaya dan anak yatim yang tidak mampu mengelola harta mereka sendiri. Kerjasama itu berdasarkan asas bagi hasil (mudarabah).

Jadi jalan yang ditempuh Nabi Muhammad saw dalam dunia perdagangan ialah dengan mengelola modal orang lain (investor). Sementara keuntungannya bisa dengan cara upah (fee based) maupun bagi hasil (profit sharing). Terdapat satu hadis beliau tentang investasi, ialah:

“Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Dapat dilihat bahwasanya Nabi Muhammad mempraktikkan langsung bisnis dan investasi. Maka dari itu, ada anjuran kuat dalam ajaran Islam untuk berinvestasi. Disamping memperkuat kemampuan ekonomi secara pribadi, investasi juga memiliki efek dan pengaruh yang luas untuk terciptanya ladang baru rezeki orang lain. Baik itu berbentuk lapangan pekerjaan maupun lapangan usaha baru.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh investor dan pihak terkait adalah sebagai berikut.⁴⁵

- a. Rezeki yang digunakan harus halal dari zat maupun cara memperolehnya.
- b. Tidak ada pihak yang terzdolimi.
- c. Harus memegang prinsip keadilan demi kemakmuran.
- d. Transaksi berdasarkan kesukarelaan tanpa paksaan.
- e. Tidak ada unsur riba, maisir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar).

2.2.6 Hubungan Investasi dan Kemiskinan

Menurut Sukirno (2000), adanya investasi ke suatu daerah akan meningkatkan kapital dan kegiatan ekonomi akan lebih maju. Melalui stok kapital akan meningkatkan penawaran ketika daya saing ekonomi juga naik. Kemudian masyarakat dapat menambah output sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi.

Masih menurut Sukirno, kegiatan investasi yang berlangsung Panjang dan terus menerus akan menambah kesempatan kerja dan taraf kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal ini tidak terlepas dari tiga fungsi investasi yaitu: 1) investasi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja. 2) adanya investasi akan menambal modal untuk barang produksi sehingga hasil produksi naik. 3) teknologi akan maju ketika perekonomian berkembang hal ini dampak dari adanya investasi.⁴⁶

Dalam keadaan fiskal yang lemah maka dibutuhkan investor swasta untuk menutupi ekonomi daerah yang pincang. Investor swasta ditarik ke daerah guna pembangunan regular untuk meningkatkan ekonomi local.

⁴⁵ I Tan, *Bisnis Dan Investasi Sistem Syariah: Perbandingan Dengan Sistem Konvensional* (Universitas Atmajaya, 2009), <https://books.google.co.id/books?id=eQBhAQAACAAJ>.

⁴⁶ PATEDA, Masinambow, and Rotinsulu, "Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo."

Iklim usaha yang kondusif tanpa ada kecurangan akan menjadi nilai tambah untuk menarik investor menanamkan modal.⁴⁷

Produktivitas di suatu daerah akan berkembang jika dibarengi dengan investasi berupa modal fisik dan juga peningkatan kualitas SDM. Investasi fisik dapat dilihat dari besaran modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan inventori. Inventasi yang tidak merata akan berdampak pada pendapatan berbagai sektor terkhusus di desa, hal ini karena fasilitas yang diperoleh untuk menunjang ekonomi desa terhambat. Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor modal fisik, rendahnya kapasitas dan keahlian penduduk dan rendahnya investasi netto.

Keterbatasan sektor akibat dari tidak meratanya investasi akan mengganggu jalannya kegiatan produksi dan akan berpengaruh pada output yang menurun. Tidak berhenti di sini, pendapatan masyarakat juga akan turun.⁴⁸ Faktor tidak meratanya distribusi investasi inilah yang menjadi pemicu lebih tingginya masyarakat miskin di desa disbanding di perkotaan.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

2.3.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Maksud dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks gabungan yang dikenakan dalam menakar capaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal pembangunan manusia. IPM menjadi jalan masuk untuk penduduk mengetahui hasil dari pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pendapatan, dll. Ada tiga kerangka yang digunakan untuk membentuk IPM. Kerangka pertama, adalah umur panjang dan hidup

⁴⁷ Siti Aminah, "Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah," *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 4, no. 2 (2017): 119–30, <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/3587>.

⁴⁸ Leli Safitri and Muhammad Effendi, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 2, no. 4 (2019): 2019, https://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.neps-data.de/Portals/0/WorkingPapers/WP_XLV.pdf%0Ahttp://www2.psy.

sehat. Indikator ini melihat lamanya hidup seseorang yang diukur dengan harapan hidup. Rangka yang kedua ialah pengetahuan. Indikator ini melihat tingkat pendidikan seseorang, standarnya adalah angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah. Kerangka ketiga yaitu standar hidup layak, merupakan tingkat kehidupan layak yang ditimbang dari pengeluaran perkapita.⁴⁹

Indeks Pembangunan Manusia dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

Dimana:

X1 : lamanya hidup

X2: tingkat pendidikan

X3: standar hidup layak diukur dengan kemampuan daya beli

Indeks lamanya hidup menggunakan penghitungan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar *United Nations Development Programme* (UNDP), yaitu angka terendah adalah 25 tahun dan batas tertinggi 85 tahun. Komponen pengetahuan diukur menggunakan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.

Inti pembangunan manusia pada prinsipnya ialah adanya progres positif dan perubahan dari dimensi budaya, sosial, politik, lingkungan, ekonomi, serta tingkat kesejahteraan. Transformasi tersebut harus terlaksana pada semua variabel kehidupan. Maka sentral pembangunan manusia terletak pada manusia dan kesejahteraannya.⁵⁰

Terdapat perbedaan menonjol antara konsep klasik pembangunan dan konsep pembangunan manusia. Intisari dari konsep klasik pembangunan

⁴⁹ Nur Baeti, "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011," *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 3 (2013): 85–98, <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1984>. H. 91

⁵⁰ Badan Pusat Statistik and Kabupaten Humbang Hasundutan, "Kabupaten Humbang Hasundutan," 2018, 46.

lebih menyoroti pertumbuhan ekonomi. Lain halnya pada konsep pembangunan manusia, lebih menitikberatkan pada ekstensi pilihan masyarakat untuk hidup penuh kebebasan dan martabat. Peningkatan kemampuan individu dan masyarakat dalam menambahkan cakupan pilihan mereka untuk meraih harapannya tidak lepas dari perhatian konsep pembangunan manusia.

Walaupun tidak bisa menakar semua faset pembangunan manusia, IPM adalah indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi utama yang dianggap bisa melukiskan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Adapun ketiga *basic capabilities* tersebut terdiri dari umur panjang dan sehat, mempunyai keterampilan dan berpengetahuan, serta tersedianya saluran menuju sumber daya yang diperlukan guna menjangkau standar hidup layak.⁵¹

United Nation Development Programe (UNDP) memberikan definisi pembangunan manusia. Menurutnya pembangunan manusia ialah suatu proses dalam rangka memperlapang opsi-opsi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan lain-lain. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan”.

2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Islam

Sumberdaya manusia menjadi pokok pembahasan dalam konsep dasar pembangunan ekonomi Islam selain tazkiah an-nafs, tauhid, dan peran pemerintah. Merujuk dari Prasetyaningrum⁵² bahwasanya “manusia berperan sebagai makhluk pembangunan yang merupakan mandataris ilahi dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan.” Mandataris ilahi

⁵¹ Mohammad Bhakti Setiawan and Abdul Hakim, “Indeks Pembangunan Manusia Manusia,” *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26 9(1) (2008): 18–26, Uny.ac.id.

⁵² Ari Kristin Prasetyoningrum, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>. H. 221

maksudnya merujuk pada tugas manusia untuk melaksanakan pembangunan. Sebab, yang menjadi tolak ukur kualitas manusia merupakan produktifitas dan hasil karyanya. Sehingga untuk menjamin kemajuan bangsa kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan.

Dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia, sejatinya Al-Qur'an dan Hadis telah menghadirkan banyak motivasi.

Q.S. Hud ayat 61:

وَأِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (٦١)

Artinya: “ dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Ayat di atas memberi pemahaman bahwa di muka bumi ini manusia memiliki peran sebagai khilafah. Kedudukan tersebut memberikan darma kepada manusia untuk memakmurkan bumi. Jika diterjemahkan dengan konteks modernisasi saat ini, ayat ini mengacu pada pelaksanaan pembangunan.

IPM dalam perspektif Islam sejatinya tidak tersungkap pemenuhan kebutuhan berlandaskan maqashid syariah. Setiap individu mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terdapat lima masalah pokok yang perlu dijaga dalam Islam, yakni pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Pemenuhan kebutuhan dasar ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi islam untuk memelihara lima masalah pokok. Sudut pandang ini memposisikan manusia sebagai pusat pembangunan. Manusia adalah subjek sekaligus objek pembangunan. Pendapat ini berlandaskan ajaran Islam yang memposisikan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia itu sendiri.

2.3.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Menurut UNDP (1996) ada pertalian antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia dimana semakin banyak masyarakat miskin maka akan berpengaruh pada pembangunan manusia. Mengingat, masyarakat yang termasuk kelompok miskin tidak berdaya dalam menciptakan output produksi sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat.

Akibat dari produktivitas rendah yaitu masyarakat sulit untuk mencukupi kebutuhan pokoknya berkaitan papan, sandang, dan pangan apalagi untuk memenuhi Pendidikan, kesehatan dan lainnya. Implikasinya, ketika masyarakat miskin tinggi maka akan sangat sulit untuk mencapai keberhasilan indeks pembangunan manusia

Dijelaskan oleh Ginting bahwa pembangunan manusia di Indonesia berkaitan erat dengan penurunan angka kemiskinan. Maka dari itu, dalam ranah Pendidikan dan kesehatan penting untuk diperhatikan dan sangat perlu diupayakan investasi di bidang tersebut. Sebab, investasi dalam bidang tersebut akan membuat manusia menjadi terampil sehingga produktivitas akan mudah dikembangkan. Bukan hanya itu, penduduk juga akan terus berkembang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan didukung oleh teknologi saat ini. Daya saing memperoleh pekerjaan juga akan meningkat bahkan tidak menutup kemungkinan untuk terus ada lapangan kerja yang mampu menyerap masyarakat miskin yang sudah terampil di bidang tertentu sesuai keahliannya. Dari sini, akan ada dorongan untuk membuat pendapatan masyarakat menjadi meningkat, sehingga kesejahteraan turut meningkat.⁵³

Subandi (2012) juga menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM tersebut dapat ditempuh dengan perbaikan beberapa akses seperti kesehatan, Pendidikan, dan gizi yang terjangkau. Pembangunan

⁵³ A N Sulistyningrum and L Muta'ali, "Analisis Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018," *Jurnal Bumi Indonesia*, 2020, <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/1210>.

manusia dihitung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia.

Todaro (2006) mengutarakan bahwa IPM melukiskan indeks pengembangan manusia dari sisi perluasan, pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Apabila IPM rendah maka akan berimbas terhadap produktivitas kerja penduduk menjadi rendah pula. Ketika produkfitas turun akan menurunkan pendapatan. Akhirnya akan meningkatkan kuantitas penduduk miskin.⁵⁴

2.4 Upah Minimum Regional

2.4.1 Pengertian Upah Minimum Regional

Upah minimum adalah batas minimal pendapatan bulanan masyarakat yang diberikan atas dasar produktivitasnya sebagai karyawan di suatu perusahaan baik di bidang barang maupun jasa. Hal ini ditetapkan berdasarkan perundang-undangan atas dasar persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pengusaha dengan karyawan, bukan hanya upah melainkan tunjangan untuk karyawan dan keluarganya.⁵⁵

Terkait dengan upah telah ditetapkan dalam PP No. 8/1981, upah minimum sebenarnya dapat digolongkan menjadi tiga yaitu minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, namun setiap daerah baru menetapkan minimum regional. Upah tersebut terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, akan tetapi yang diatur jelas dalam peraturan pemerintah hanyalah upah pokok. Ketidakjelasan tersebut sering menimbulkan kontroversi antara pekerja dan pengusaha. Tunjangan tetap yang dimaksud adalah fasilitas yang diberikan pengusaha kepada pekerja tanpa melihat

⁵⁴ Ni Komang et al., “Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014” 5 (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/5350-ID-pengaruh-program-indeks-pembangunan-manusia-ipm-terhadap-pengentasan-kemiskinan.pdf>.

⁵⁵ Danny Nur Febrianica, “Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum,” 2015.

tingkat kehadiran dan produktivitas yang dihasilkan melainkan berdasarkan lamanya kerja di perusahaan tersebut.

Tujuan adanya upah minimum adalah bentuk perlindungan hak pekerja atas kaum pemilik modal atau pengusaha agar tidak sewenang-wenang memperlakukan pekerja. Sehingga anantara keduanya memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan aktivitasnya berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing tanpa ada yang dirugikan. Peraturan tersebut wajib ditaati oleh setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia.⁵⁶

Rujukan upah di Indonesia berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa “upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL).” Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, mendefinisikan upah minimum sebagai ”Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap...”. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya.

Upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral. Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut.⁵⁷

⁵⁶ S.H.S.H. Dilli Malianawati and E Publishing, *Pemberian Upah Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila: Eternity Publishing* (Eternity Publishing, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=j6QkEAAAQBAJ>.

⁵⁷ Rini Sulistiawati, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia,” *Jurnal Eksos* 8 (2012): 195–211.

2.4.2 Upah Minimum Regional Dalam Islam

Upah adalah sebuah bayaran atau imbalan yang diberikan atas jasa dalam proses produksi. Dalam Bahasa Arab upah adalah *al-ujrah* berarti *iwad* atau ganti.⁵⁸ Islam memandang upah agar tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. Upah tidak boleh ada yang merasa tertindas sehingga sifatnya adil, hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qu’ran:

“.... *Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*” (Q. S. Al-Baqarah: 279)

Ayat tersebut menjadi sebuah peringatan untuk bersikap jujur dan adil serta tidak saling merugikan satu sama lain. Mawardi menegaskan bahwa penetapan upah harus standar yaitu cukup untuk menutupi kebutuhan minimum seseorang.

Jika dilandaskan pada prinsip keadilan, penetapan upah di dalam Islam bersasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja dengan menjaga kepentingan keduanya. Islam juga memperhatikan tingkat upah minimum berdasarkan prinsip kelayakan dari upah. Selanjutnya negara yang mengemban tanggung jawab untuk memastikan standar upah tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Pada dasarnya, upah akan berubah dengan sendirinya bergantung pada hukum permintaan dan penawaran tenaga kerja. Hukum itu bertalian erat dengan berbagai faktor yakni: standar hidup pekerja, kekuatan organisasi pekerja, dan sikap para majikan yang mencerminkan keimanan mereka.⁵⁹

2.4.3 Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Kemiskinan

Kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan. Pendekatan model kompetitif menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum yang selalu terjadi setiap tahun serta kenaikannya yang berada di atas tingkat keseimbangan ini dapat memberikan dampak

⁵⁸ R A Ghofur, *KONSEP UPAH DALAM EKONOMI ISLAM* (Arjasa Pratama, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=GLYHEAAAQBAJ>.

⁵⁹ Jurnal Ilmu-ilmu Agama Issn, “Al-Mujaddid | Jurnal Ilmu-Ilmu Agama ISSN: 2655-271X” 1, no. 1 (2018): 19–31.

negatif terhadap kemiskinan. Peningkatan tersebut akan mendorong terjadinya peningkatan penawaran tenaga kerja dan pengurangan penyerapan tenaga kerja. Sementara peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja berakibat pada kelebihan penawaran tenaga kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kemiskinan.

Sedangkan berdasarkan pada model dual sektor kenaikan upah minimum ini juga memiliki dampak terhadap pekerja di sektor informal. Sektor informal akan menampung kelebihan tenaga kerja dari sektor formal. Pergeseran pekerja sektor formal ke sektor informal tersebut berbuntut pada merosotnya tingkat upah di sektor informal. Dapat diketahui bahwa di sektor informal banyak pekerja yang berkategori miskin, sehingga penurunan tingkat upah di sektor informal sebagai respon kenaikan upah minimum di sektor formal ini dapat menambah jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Menurut Kaufman (2000) Lahirnya upah minimum bermaksud untuk mencapai standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi, serta kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Naiknya tingkat upah minimum akan mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Pada gilirannya hal itu akan berimbas pada tumbuhnya kesejahteraan masyarakat sehingga mereka bisa lekap dari kemiskinan.

Peran pekerja/buruh, penguasa dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja atau buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta

pemerintah dapat menjaga perkembangan dan meningkatkan perekonomian dengan baik.⁶⁰

2.5 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	Amelia Sestu Rahajeng, Sri Muljaningsih, dan Kiky Asmara	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur	Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendidikan, dan Kesehatan Dependen: Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • investasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2009-2019 • pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2009-2019 • pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2009-2019 dengan • kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2009-2019
2.	Gusti Ayu Putu Ambara Ratih, Made Suyana Utama, I Nyoman Mahaendra Yasa	Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan	Independen : Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dependen: Produk Domestik Regional Bruto dan	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali • Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali.

⁶⁰ Negeri Jenggawah et al., *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Jember Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember*, 2010.

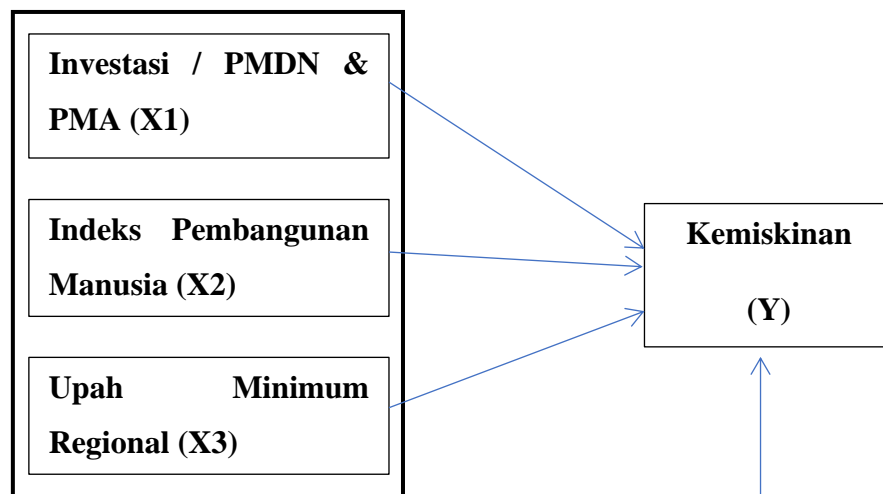
		Tingkat kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali	Tingkat kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. • Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali
3.	Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto	Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap angka Kemiskinan Di Indonesia	Independen: Produk Domestik Bruto (Pdb) dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dependen : angka Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan • PDRB belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan
4.	Mukarramah, Cindy Yolanda, Muhammad Zulkarnain	Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur	Independen: Belanja Modal dan IPM Dependen: Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. • Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan
5.	Ardhian Kurniawati, Beni Teguh Gunawan, Disty Putri Ratna Indrasari	Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesiatahu n 2006-2014	Independen Upah Minimum Dependen Kemiskinan	upah minimum berdampak negative dan signifikan terhadap kemiskinan
6.	Shinta Setya Ningrum	Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran	Independen Tingkat Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Upah minimum berdampak positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin

		Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011- 2015	Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Dependen Jumlah Penduduk Miskin	<ul style="list-style-type: none"> • IPM negatif dan signifikan terhadap Jumlah penduduk miskin
--	--	---	---	--

Tabel 2 Penelitian terdahulu

2.6 Kerangka Teoritik

Berdasarkan landasan teori di atas, maka disusun kerangka teoritik sebagai berikut:



Gambar 3 Kerangka Teoritis

2.7 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis sangatlah penting dalam penelitian. Menurut Arikunto (2000) hipotesis adalah kebenaran (belum tentu benar) yang baru

dapat diangkat menjadi kebenaran bila disertai bukti-bukti. Hipotesis ialah jawaban sementara sebuah masalah penelitian yang harus dibuktikan secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau apa yang ingin kita cari.⁶¹

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H1: Investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis ini ditarik berdasarkan teori yang disampaikan oleh Sukirno. Menurutnya investasi yang masuk ke suatu daerah akan menambah kapital dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Melalui stok kapital yang masuk, investasi dapat menaikkan penawaran jika dalam jangka panjang investasi dapat masuk kesuatu daerah berlangsung terus menerus dan dibarengi ekonomi berdaya saing tinggi. Selanjutnya, masyarakat dapat meningkatkan output yang menambah kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi perolehan kapital maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

2. H2: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Hipotesis ini dilandaskan pada pernyataan Todaro (2006) bahwasanya IPM ialah cerminan dari indeks pengembangan manusia yang ditilik dari segi perluasan, pemerataan, dan keadilan, baik itu dari faset kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan masyarakat. Rendahnya produktivitas berakibat pada perolehan pendapatan yang rendah, sehingga mendorong naiknya jumlah penduduk miskin. Rendahnya IPM akan mengakibatkan pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk.

⁶¹ Ig. Dodiet Aditya Setyawan, *Hipotesis Dan Variabel Penelitian* (Penerbit Tahta Media Group, 2021). H. 8

Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan, sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.⁶²

3. H3: Upah minimum regional berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Hipotesis ini didasarkan pada pernyataan Kaufman bahwa ”semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.”

4. H4: Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Dari ketiga hipotesis di atas munculah hipotesis keempat bahwa Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional secara simultan berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

⁶² Komang et al., “Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014.”

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif diantaranya diuraikan oleh I Made Laut Mertha Jaya. Menurutnya, penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang melahirkan temuan-temuan yang bisa dijangkau dengan beberapa prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kuantitatif lebih memperhatikan gejala atau fenomena yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu, atau dikenal dengan variabel.⁶³ Menurut Creswell (2009) penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji suatu teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel.⁶⁴

Adapun sumber data yang digunakan adalah sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan dari sumber pertama,⁶⁵ melainkan dihimpun dari data yang telah ada. Data sekunder datang dari pengumpulan data pihak lain untuk kepentingan tertentu (bukan penelitian saat ini),⁶⁶ atau produk dari pengolahan kedua data primer. Dengan kata lain, data sekunder didapatkan dari suatu lembaga atau pihak tertentu yang telah menggunakan atau mempublikasikannya.⁶⁷

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan semua kelompok orang, peristiwa, atau hal lain yang menjadi minat peneliti untuk diteliti dan dibuat simpulan pada

⁶³ I.M.L.M. Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020). H. 6

⁶⁴ A Kusumastuti, M P Ahmad Mustamil Khoiron, and M P Taofan Ali Achmadi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sleman: Deepublish, 2020). H. 10

⁶⁵ I Gani and S Amalia, *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi Dan Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015). h.2

⁶⁶ P M Sholihin and S E Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021). H. 26

⁶⁷ M. Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Untuk: Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo (Anggota IKAPI), 2015). H. 147

karakteristiknya berdasarkan data sampel.⁶⁸ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten yang ada di Jawa Tengah.

Sampel adalah bagian atau sub kelompok dari suatu populasi. Sampel dalam penelitian ini mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Tercatat sebagai kabupaten/kota di Jawa Tengah
2. Mempunyai data secara lengkap terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu presentase kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Upah minimum regional.
3. Telah mempublikasikan data secara lengkap kurun waktu 2018-2021 di Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Adapun yang memenuhi kriteria sampel di atas adalah sebagai berikut:

Kab. Cilacap	Kab. Pemasang
Kab. Banjarnegara	Kab. Purbalingga
Kab. Banyumas	Kab. Rembang
Kab. Batang	Kab. Semarang
Kab. Blora	Kab. Sragen
Kab. Boyolali	Kab. Sukoharjo
Kab. Brebes	Kab. Tegal
Kab. Demak	Kab. Temanggung
Kab. Grobogan	Kab. Wonogiri
Kab. Jepara	Kab. Wonosobo
Kab. Karanganyar	Kota Magelang
Kab. Kendal	Kota Pekalongan
Kab. Klaten	Kota Salatiga
Kab. Kudus	Kota Semarang
Kab. Magelang	Kota Surakarta
Kab. Kab. Pati	Kota Tegal

Tabel 3 Sampel Penelitian

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengenakan studi literatur dikenakan sebagai metode pengumpulan data. Dalam hal ini berupa pengumpulan data teks, jurnal

⁶⁸ Sholihin and Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*. H. 6

penelitian, internet maupun sumber lainnya. Kemudian penulis menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dengan laman jateng.bps.go.id, Serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pibtu Provinsi Jawa Tengah melalui laman <https://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/>. Bentuk data berupa data panel dengan objek kabupaten/kota di Jawa Tengah yang diambil secara berkala rentang waktu 2018-2021. Data yang diambil dalam penelitian ini ialah data tahunan periode 2018-2021.

Data yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian ini adalah:

1. Data presentase kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
2. Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
3. Data Upah Minimum Regional Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
4. Data realisasi investasi PMDN dan PMDA Kabupaten/kota di Jawa Tengah

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel independen⁶⁹. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (Y) di Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2005) mengungkapkan variabel kemiskinan dalam penelitian ini adalah kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Besarnya kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan. Jenis data berupa data tahunan presentase kemiskinan Kabupaten/kota di Jawa

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). H. 39

Tengah kurun waktu 2018-2021 . Data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

b. Variabel Independen (Bebas)

- 1) Investasi adalah pemutaran dana yang bermaksud mendapatkan pengembalian atau keuntungan dari hasil dana tersebut dalam jangka waktu satu periode atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi dalam penelitian ini ialah total realisasi PMDN dan PMDA Kabupaten/kota di Jawa Tengah kurun waktu 2018-2021. Data diperoleh dari BPS dan badan penanaman modal terpadu satu pintu, berupa data tahunan kurun waktu 2018-2021.
- 2) Upah minimum Regional adalah penerimaan bulanan minimum atau terendah sebagai imbalan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan sendiri maupun untuk keluarganya. Upah Minimum Regional dalam penelitian ini menggunakan Upah minimum Kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagaimana yang ditetapkan pemerintah daerah.
- 3) Indeks pembangunan manusia adalah indeks gabungan yang dipakai untuk menghitung capaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal pembangunan manusia, yaitu indeks harapan hidup, pendidikan, dan indeks hidup layak. Data yang dipakai adalah data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari Badan Pusat Statistik kurun waktu 2018-2021.

3.5 Teknik Analisis Data

Agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengambilan keputusan, data harus diolah dan dikaitkan dalam konteks tertentu. Analisis data penting dilakukan sebagai dasar menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan mengambil kesimpulan penelitian.⁷⁰ Analisis data ialah aktivitas mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari responden untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan⁷¹. Skripsi ini menggunakan teknik analisis regresi data panel melalui aplikasi eviews. Data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*).⁷²

Persamaan dasar regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = tingkat kemiskinan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi untuk X_1

β_2 = Koefisien regresi untuk X_2

β_3 = Koefisien regresi untuk X_3

X_1 = Investasi

X_2 = Upah Minimum Regional

X_3 = Indeks Pembangunan Manusia

ε = Koefisien Error

⁷⁰ Sholihin and Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*. H. 3

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. H. 57

⁷² Rifkhan, *Membaca Hasil Regresi Data Panel* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022).

- i = jumlah kabupaten/kota yang dianalisis yakni sejumlah 32
- t = periode waktu penelitian, yakni tahun 2018-2021

3.5.1 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel

Untuk mengerjakan estimasi regresi data panel, ada tiga model pendekatan yaitu: *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

1) *Common Effect Model*

Model ini bisa disebut sebagai sebagai model paling sederhana diantara model estimasi regresi data panel yang lain. Sebab, model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* tanpa memperhatikan dimensi ruang dan waktu yang dimiliki data panel. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwasanya perilaku data sama di berbagai kurun waktu.

Common Effect Model menjalani perlakuan yang sama dengan pendekatan *Ordinary Least Square OLS*. *OLS* ialah metode estimasi yang kerap dipakai dalam mengestimasi fungsi regresi populasi dari fungsi regresi sampel.

2) *Fixed Effect Model*

Model *Fixed Effect* menganut asumsi adanya pengaruh yang berbeda antar individu. Dismilaritas tersebut bisa diselesaikan melalui perbedaan intersep. *Fixed Effect Model* mempercayai bahwa masing-masing individu mempunyai parameter yang tidak diketahui. Jadi untuk mengestimasiannya bisa memakai teknik variabel *dummy*. Maka dari itu, pendekatan yang memasukkan variabel *dummy* akrab dengan sebutan *Least Square Dummy Variable (LSDV)* atau juga disebut *covariance model*.⁷³

3) *Random Effect Model*

⁷³ B Juanda, *Ekonometrika Deret Waktu: Teori Dan Aplikasi* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021).h. 182

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya model *fixed effect* untuk mengestimasi data panel memperlihatkan ketidakpastian model yang digunakan. Model *random Effect* menggunakan variabel residual yang dapat dipakai untuk mengestimasi masalah ini. Pendekatan *random effect* memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan *error* dari *cross-section* dan *time series*.

Keuntungan dalam model ini ialah menghilangkan heterokedastisitas. Berbeda dari dua model yang lain, *Random Effect Model* termasuk pada *Generalized Least Square* yang mengasumsikan homokedastisitas dan tidak ada *cross sectional relation*.⁷⁴

3.5.2 Tahapan Analisis Data

Sebelum melangsungkan analisis regresi data panel, terlebih dahulu dilakukan uji chow, hausman, dan lagrange multiplier untuk menentukan model regresi data panel mana yang lebih tepat. Setelah itu data-data harus lolos uji asumsi klasik. Hal ini penting karena uji asumsi klasik membatasi baik atau tidaknya hasil regresi data panel sebagai alat prediksi. Dapat diakui sebagai model regresi yang baik jika mempunyai proyeksi yang tidak bias dan dapat dipercaya. Model dianggap memadai jika syarat-syarat terpenuhi, yaitu: memenuhi uji normalitas serta lepas dari uji multikolinieritas, heterokedastisitas.

a. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Dari ketiga model estimasi regresi data panel, perlu dipilih model manakah yang paling sesuai. Hal ini dapat dilakukan dengan pengujian, yaitu uji *chow* dan uji *hausman*.

1) Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *common effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada Uji chow adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Juanda. H. 183

H_0 : *Common Effect*

H_1 : *Fixed Effect*

Kriteria :

Jika nilai sig > α maka H_0 diterima

Jika nilai sig < α maka H_1 diterima

2) Uji *Hausman*

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *random effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada Uji hausman adalah sebagai berikut:⁷⁵

H_0 : *RandomEffect*

H_1 : *Fixed Effect*

Kriteria :

Jika nilai sig > α maka H_0 diterima

Jika nilai sig < α maka H_a diterima

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk memeriksa apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Nilai residualnya terdistribusi dengan normal menjadi ciri dari model regresi yang baik. Uji normalitas pada penelitian ini memakai *jarque-Berra*. Dimana hasilnya dapat dilihat dari nilai probabilitas *jarque-Berra*.⁷⁶ Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5%, maka data dikatakan berdistribusi normal.

Jika model yang terpilih menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) maka tidak perlu dilakukan uji normalitas karena sudah diantisipasi.

⁷⁵ Juanda.

⁷⁶ S.E.M.S. Rochmat Aldy Purnomo and P C A S, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS* (Ponorogo: CV. WADE GROUP bekerjasama dengan UNMUH Ponorogo Press, 2016). H. 108

2) Uji Multikolinearitas

Tujuan dilaksanakannya Uji Multikolinearitas yaitu untuk memeriksa apakah ada korelasi antar variable independent dalam regresi. Apabila terjadi korelasi, artinya ada problem multikolinearitas (multiko).⁷⁷ Diterima sebagai model regresi yang baik apabila antar variabel independennya tidak ada korelasi yang kuat. Apabila terdapat nilai lebih besar dari 0.8 maka dalam data tersebut ada masalah multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai yang muncul lebih kecil dari 0.8 maka tidak terjadi masalah multikoleniaritas.⁷⁸

3) Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas, yaitu varian dari residual data yang sama. Ada atau tidaknya kesamaan antar residual data observasi pada sebuah model regresi diuji dengan Uji heteroskedastisitas. Untuk mencari tahu terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dapat melalui uji Glejser. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi untuk variabel independen $> 0,05$.⁷⁹

Heteroskedastisitas mayoritas terbentuk pada data silang (*cross section*), dimana data panel lebih dekat ke ciri data *silang* dibandingkan runtut waktu. Metode *Generalized Least Square* (GLS) sudah mengantisipasi heterokedastisitas dan tidak ada *cross sectional correlation*. Sehingga jika metode yang baik di gunakan menggunakan Random Effect, maka tidak perlu dilakukan uji heteroskedastisitas.

c. Uji Hipotesis

⁷⁷ C Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian New Edition Buku Untuk Orang Yang (Merasa) Tidak Bisa Dan Tidak Suka Statistika* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=babXDwAAQBAJ>. H. 119

⁷⁸ Latan Hengki and Selva Temalagi., *Analisis Multivariate Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. (Bandung: Alfabeta, 2013). H. 63

⁷⁹ Hengki and Temalagi. H. 63

1) Uji t (Uji Parsial)

Uji t memeriksa apakah variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maknanya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen⁸⁰. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

2) Uji F (Uji Simultan)

Uji F bermaksud memeriksa apakah variabel-variabel independen yang dipakai dalam penelitian secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruhnya diuji dengan cara membandingkan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} dengan signifikansi $P < 0,05$. Variabel independennya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketika $F_{hitung} > F_{tabel}$ ⁸¹. Begitu pun sebaliknya, artinya secara bersama-sama semua variabel independennya tidak berpengaruh ke variabel dependen pada saat $F_{hitung} < F_{tabel}$.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi⁸². Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Nilai koefisien determinan yang kecil

⁸⁰ Latan dan Temalagi, *Analisis Multivariate ...*, h. 81.

⁸¹ Latan dan Temalagi, *Analisis Multivariate ...*, h. 81.

⁸² Latan dan Temalagi, *Analisis Multivariate ...*, h. 80.

atau mendekati 0 artinya variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya terbatas. Sedangkan jika mendekati 1 maka semua variabel independennya hampir dapat menjelaskan dan memberi informasi yang dibutuhkan mengenai variabel dependennya⁸³.

⁸³ Agus Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Ed. 2, 2015, h. 18.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Jawa Tengah adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Kota Semarang. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5⁰40' – 8⁰30' Lintang Selatan dan antara 108⁰30' – 111⁰30' Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.800,69 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 berjumlah 36.516.035 jiwa dengan kepadatan 1.113,00 jiwa/km².

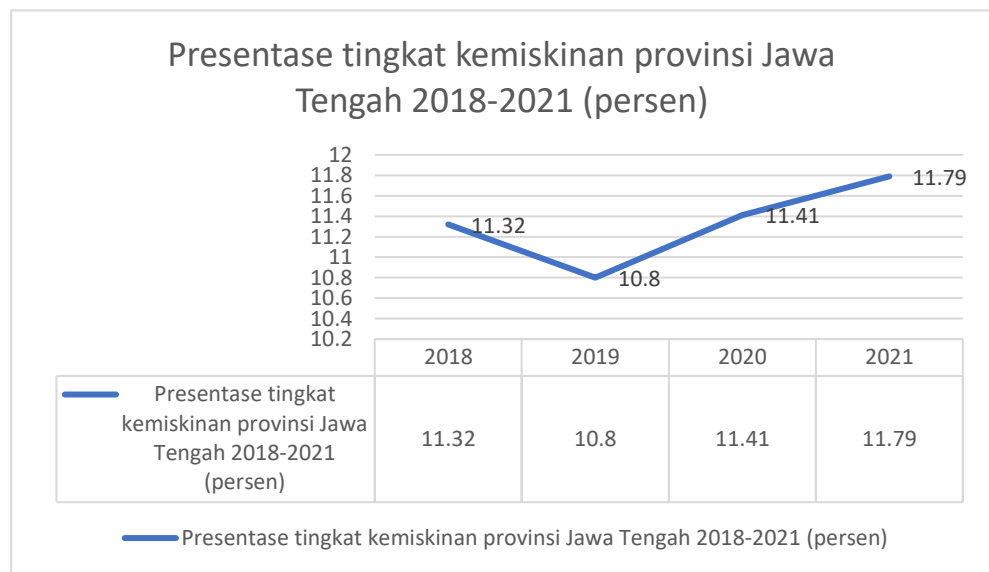
Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum tahun 2001, Pemerintahan Daerah Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya otonomi daerah, kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).

4.1.1 Kemiskinan di Jawa Tengah

Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan besar bagi provinsi-provinsi di Indonesia.⁸⁴ Pun Provinsi Jawa Tengah yang belum bisa lepas dari masalah kemiskinan. Pengertian kemiskinan pada penelitian ini ialah

⁸⁴ Sriyana, "Reducing Regional Poverty Rate in Central Java." H.2

tidak mempunya individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2005). Secara umum kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Meski sempat turun pada tahun 2019, tapi setelah itu nilai kemiskinan melonjak kembali. Tahun 2018 tingkat kemiskinan di angka 11.32 kemudian turun di angka 10,8, setelah itu naik lagi di angka 11,41 di tahun 2020 dan 11,79 di tahun 2021.



Gambar 4 Presentase tingkat kemiskinan provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021

Sumber: BPS.go.id (diolah)

Menurut publikasi BPS, “Indikator kesejahteraan rakyat Jawa Tengah 2022” peningkatan kemiskinan dari tahun 2019 – 2021 berkaitan erat dengan fenomena pandemi Covid 19. Kelompok-kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah kelompok miskin, rentan miskin, pekerja informal. Lima puluh persen masyarakat berpendapatan rendah (1,8 juta kebawah) pendapatannya berkurang. Penurunan ini menambang angka

kemiskinan sebab penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulan turut bertambah.⁸⁵

4.1.2 Investasi di Jawa Tengah

Secara teori dikatakan investasi dapat mendorong berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Investasi merupakan media untuk meningkatkan output. Banyak hal diperlukan dalam menghasilkan output, yakni bahan baku, tenaga kerja, dan bahan modal yang dipakai pada proses produksi. Investasi diharapkan bisa menambah stok kapital yang kemudian akan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan demikian, output dan pendapatan masyarakat akan meningkat.⁸⁶

Tren realisasi investasi di Jawa Tengah secara umum mengalami kenaikan. Meski sempat turun dari tahun sebelumnya pada tahun 2019, investasi berhasil meningkat lagi pada tahun 2020 dan 2021.



Gambar 5 Realisasi investasi Jawa Tengah 2018-2021

Sumber: BPS.go.id (diolah)

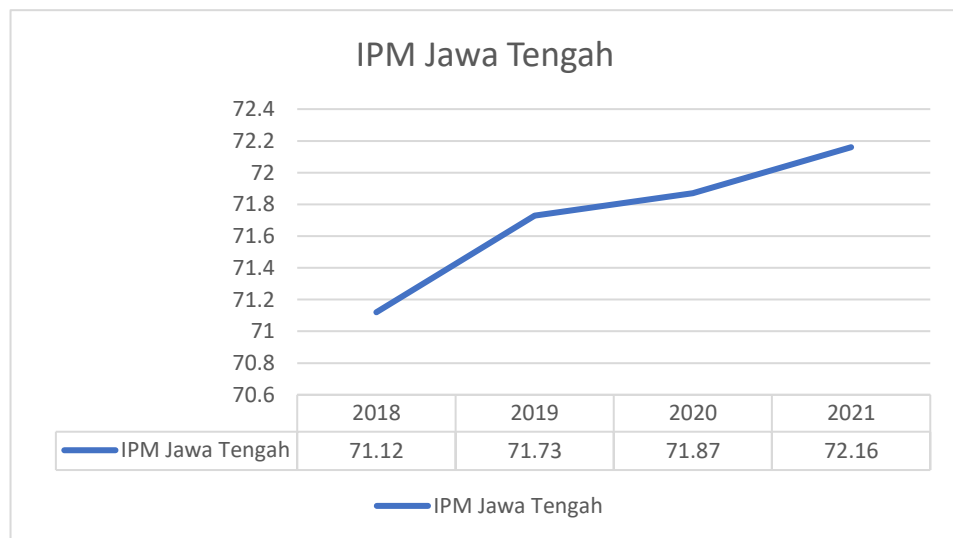
⁸⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2022," *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah* (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022). H. 64

⁸⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sektor Provinsi Jawa Tengah 2016-2020*, *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, 2020. H.7

4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah

Kualitas sumber daya manusia ialah salah satu penyebab kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia diukur dari Indeks Pembangunan Manusia. Rendahnya IPM berdampak pada rendahnya produktivitas penduduk. Kualitas manusia bisa ditingkatkan dengan beberapa kebijakan, diantaranya: pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan bagi penduduk miskin alternatif peningkatan kualitasnya dengan memberikan keterampilan teknis. Investasi di bidang pendidikan akan lebih berguna bagi penduduk miskin dibanding penduduk tidak miskin. Sebab aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar. Adanya akses pendidikan dan kesehatan murah akan meningkatkan produktivitas.

Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2018 sampai tahun 2021 selalu meningkat. Pada tahun 2018 di angka 71,12 pada tahun 2019 menjadi 71,73, meningkat menjadi 71,87 pada tahun 2020, dan 72,16 di tahun 2021.



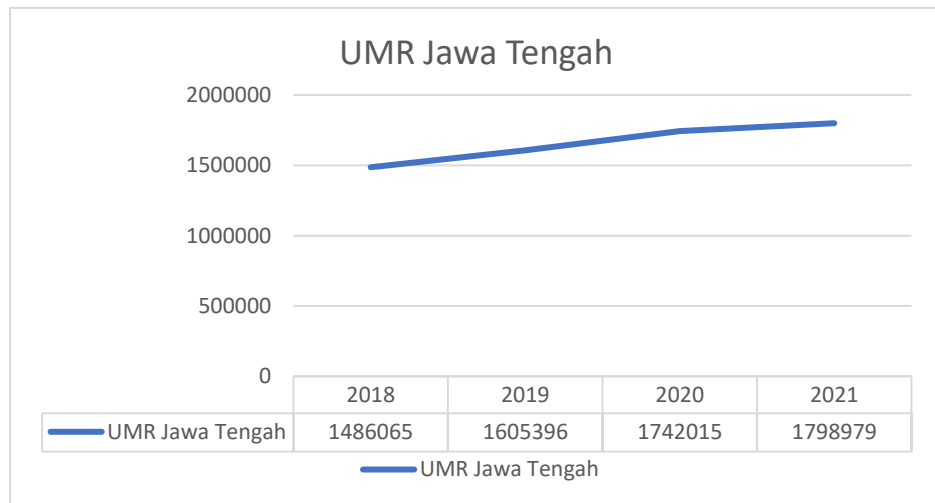
Gambar 6 IPM Jawa Tengah

Sumber: BPS.go.id (diolah)

4.1.4 Upah Minimum Regional di Jawa Tengah

Upah merupakan sumber penghasilan. Ketika penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan turun atau tetap, kemudian akan memberi pengaruh pada kemiskinan.⁸⁷ Upah minimum di Indonesia pada awalnya ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada perkembangannya, kenaikan upah minimum berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.⁸⁸ Kebijakan upah minimum dikeluarkan pemerintah guna melindungi kepentingan pekerja. Berlakunya kebijakan upah minimum bercita-cita untuk memberikan konsekuensi positif bagi kesejahteraan hidup pekerja.⁸⁹ Jika efektif, upah minimum dapat menjadi salah satu media untuk mengurangi kemiskinan.

Upah minimum regional Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sejumlah Rp 1.486.065 menjadi Rp 1.605.396 di tahun 2019. Kemudian meningkat lagi menjadi Rp 1.742.015 di tahun 2020 dan Rp 1.298.979 di tahun 2021



Gambar 7 UMR Jawa Tengah

⁸⁷ Ningrum, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015.” H. 185

⁸⁸ Kurniawati, Gunawan, and Indrasari, “Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014.” H. 234

⁸⁹ Febrianica, “Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum.”

Sumber: BPS.go.id (diolah)

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Pemilihan model Estimasi regresi data panel

1. Uji Chow

Guna memilih diantara model koefisien tetap (CEM) atau model efek tetap (FEM) yang lebih tepat untuk estimasi data, maka uji chow perlu dilakukan. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, uji hipotesis dalam uji chow adalah:

H_0 : Common Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Dimana:

Jika nilai signifikan >0.05 maka H_0 diterima

Jika nilai signifikan <0.05 maka H_1 diterima

CEM

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 12/18/22 Time: 22:09 Sample: 2018 2021 Periods included: 4 Cross-sections included: 32 Total panel (balanced) observations: 128				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.12598	3.626500	13.27064	0.0000
X1	-2.49E-07	1.51E-07	-1.648865	0.1017
X2	-0.491256	0.052632	-9.333836	0.0000
X3	-8.11E-07	1.12E-06	-0.725485	0.4695
R-squared	0.503925	Mean dependent var		10.72820
Adjusted R-squared	0.491923	S.D. dependent var		3.456770
S.E. of regression	2.463968	Akaike info criterion		4.672174
Sum squared resid	752.8210	Schwarz criterion		4.761300
Log likelihood	-295.0192	Hannan-Quinn criter.		4.708387
F-statistic	41.98744	Durbin-Watson stat		0.085950
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Common Effect Model (CEM)

Sumber: Olah data Eviews 12, 2022

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/18/22 Time: 22:13
 Sample: 2018 2021
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 32
 Total panel (balanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.35413	12.00924	3.526795	0.0007
X1	2.81E-08	3.42E-08	0.822461	0.4129
X2	-0.508019	0.177188	-2.867115	0.0051
X3	2.76E-06	5.01E-07	5.505298	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992938	Mean dependent var	10.72820
Adjusted R-squared	0.990356	S.D. dependent var	3.456770
S.E. of regression	0.339476	Akaike info criterion	0.904618
Sum squared resid	10.71770	Schwarz criterion	1.684470
Log likelihood	-22.89557	Hannan-Quinn criter.	1.221476
F-statistic	384.5643	Durbin-Watson stat	2.471998
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Sumber: Olah data eviews 12, 2022

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	207.722733	(31,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	544.247158	31	0.0000

Tabel 6 Uji Chow

Sumber: Olah data eviews 12, 2022

Hasil uji chow pada tabel 6 memperlihatkan nilai probabilitas *cross section F* dan *cross section chi-square* 0.0000 atau kurang dari 0.05 atau ($0.0000 < 0.05$). Nilai tersebut artinya H_1 diterima. Atau jika dibandingkan antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* maka *Fixed Effect Model* yang sebaiknya dipilih.

2. Uji Hausman

Karena dari uji chow menyimpulkan model FEM lebih baik dari CEM, maka langkah selanjutnya membandingkan antara dua model FEM dan REM. Metode yang digunakan ialah melalui uji hausman. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, hipotesis dari uji hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : Random Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Dimana:

Jika nilai signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima

Jika nilai signifikansi < 0.05 maka H_1 diterima

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/18/22 Time: 22:23
 Sample: 2018 2021
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 32
 Total panel (balanced) observations: 128
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.23354	5.960493	7.588893	0.0000
X1	2.04E-08	3.40E-08	0.600669	0.5492
X2	-0.548956	0.087727	-6.257543	0.0000
X3	2.81E-06	3.14E-07	8.938589	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.456306	0.9813
Idiosyncratic random		0.339476	0.0187

Weighted Statistics			
R-squared	0.385257	Mean dependent var	0.739587
Adjusted R-squared	0.370384	S.D. dependent var	0.437882
S.E. of regression	0.347452	Sum squared resid	14.96961
F-statistic	25.90346	Durbin-Watson stat	1.742924
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.406144	Mean dependent var	10.72820
Sum squared resid	901.2098	Durbin-Watson stat	0.028951

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Random Effect Model (REM)

Sumber: Olah data views 12, 2022

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.894825	3	0.0307

Tabel 8 Uji Hausman

Sumber: Olah data views 12, 2022

Hasil Uji Hausman pada tabel 8 memperlihatkan nilai probabilitas *cross section random* senilai 0.0307. Angka tersebut artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.0307 < 0.05$) sehingga H1 diterima. Dapat disimpulkan dari uji hausman ini jika model estimasi *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Random Effect Model*.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Pada uji regresi data panel dengan model estimasi *Fixed Effect Model*, terdapat dua uji asumsi klasik yang wajib dilangsungkan, yakni uji heteroskedastisitas dan uji multikoleniaritas.

1. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas, yaitu varian dari residual data yang sama. Ada atau tidaknya kesamaan antar residual data observasi pada sebuah model regresi diuji dengan Uji heteroskedastisitas. Untuk mencari tahu terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dapat melalui uji Glejser. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi untuk variabel independen $> 0,05$.⁹⁰

Dependent Variable: ABS(RESIDUAL)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/18/22 Time: 22:46
 Sample: 2018 2021
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 32
 Total panel (balanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.747369	0.232582	3.213359	0.0017
X1	1.21E-08	9.67E-09	1.252003	0.2129
X2	-0.003977	0.003375	-1.178177	0.2410
X3	-1.21E-07	7.17E-08	-1.684454	0.0946
R-squared	0.049382	Mean dependent var		0.241421
Adjusted R-squared	0.026383	S.D. dependent var		0.160151
S.E. of regression	0.158024	Akaike info criterion		-0.821387
Sum squared resid	3.096480	Schwarz criterion		-0.732261
Log likelihood	56.56877	Hannan-Quinn criter.		-0.785175
F-statistic	2.147156	Durbin-Watson stat		2.701199
Prob(F-statistic)	0.097684			

⁹⁰ Hengki and Temalagi. H. 63

Gambar 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Olah data eviews 12, 2022

Gambar 8 memperlihatkan nilai probabilitas variabel independent uji gletser x_1 yakni 0.21, x_2 senilai 0,24, dan x_3 sebesar 0.09 yang semuanya lebih besar dari alfa ($> 0,05$). Angka berikut mencerminkan data telah lolos uji heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas

Maksud dari dilangsungkannya uji multikolinearitas ialah untuk memeriksa apakah ada korelasi antar variable independent dalam regresi. Apabila terjadi korelasi, artinya ada problem multikolinearitas (multiko).⁹¹ Diterima sebagai model regresi yang baik apabila antar variabel independennya tidak ada korelasi yang kuat. Apabila terdapat nilai lebih besar dari 0.8 maka dalam data tersebut ada masalah multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai yang muncul lebih kecil dari 0.8 maka tidak terjadi masalah multikoleniaritas.

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.214977	0.490129
X2	0.214977	1.000000	0.405177
X3	0.490129	0.405177	1.000000

Tabel 9 Hasil Uji Multikoleniaritas

Sumber: Olah data eviews 12, 2022

Berdasarkan tabel 9 di atas, nilai X_1, X_2 , dan X_3 semuanya dibawah 0.8. artinya, dalam data berikut sudah lolos uji multikoleniaritas.

4.2.3 Uji Ketetapan Model

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

⁹¹ Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian New Edition Buku Untuk Orang Yang (Merasa) Tidak Bisa Dan Tidak Suka Statistika*. H. 119

Uji F bermaksud memeriksa apakah variabel-variabel independen yang dipakai dalam penelitian secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruhnya diuji dengan cara membandingkan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} dengan signifikansi $P < 0,05$. Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.992938	Mean dependent var	10.72820
Adjusted R-squared	0.990356	S.D. dependent var	3.456770
S.E. of regression	0.339476	Akaike info criterion	0.904618
Sum squared resid	10.71770	Schwarz criterion	1.684470
Log likelihood	-22.89557	Hannan-Quinn criter.	1.221476
F-statistic	384.5643	Durbin-Watson stat	2.471998
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 10 Hasil Uji F

Sumber: Olah data eviews 12, 2022

Dari tabel 10 terlihat bahwa nilai F_{hitung} 384.5643 dengan probabilitas (F -statistik) 0.000000. Nilai probabilitasnya 0.000000 lebih kecil dari 0.05. Artinya variabel investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional secara bersama-sama berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi⁹². Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan hasil sebagai berikut:

⁹² Latan dan Temalagi, *Analisis Multivariate ...*, h. 80.

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.992938	Mean dependent var	10.72820
Adjusted R-squared	0.990356	S.D. dependent var	3.456770
S.E. of regression	0.339476	Akaike info criterion	0.904618
Sum squared resid	10.71770	Schwarz criterion	1.684470
Log likelihood	-22.89557	Hannan-Quinn criter.	1.221476
F-statistic	384.5643	Durbin-Watson stat	2.471998
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 11 Tabel Hasil Uji Koefisien determinasi

Sumber: Olah data Eviews 12,2022

Tabel 11 menampilkan nilai *R-squared* sebesar 0,992938 atau 99,2%. Artinya variabel independen investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional mampu menjelaskan variabel dependen tingkat kemiskinan sebesar 99,2%. Sementara sisanya 0,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk pada model penelitian.

4.2.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Persamaan regresi data panel pada penelitian ini diperoleh hasil yang terbaik ialah memakai *Fixed Effect Model*. Berikut ini merupakan hasil uji regresi data panel dengan metode FEM:

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/18/22 Time: 22:13
 Sample: 2018 2021
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 32
 Total panel (balanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.35413	12.00924	3.526795	0.0007
X1	2.81E-08	3.42E-08	0.822461	0.4129
X2	-0.508019	0.177188	-2.867115	0.0051
X3	2.76E-06	5.01E-07	5.505298	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.992938	Mean dependent var	10.72820
Adjusted R-squared	0.990356	S.D. dependent var	3.456770
S.E. of regression	0.339476	Akaike info criterion	0.904618
Sum squared resid	10.71770	Schwarz criterion	1.684470
Log likelihood	-22.89557	Hannan-Quinn criter.	1.221476
F-statistic	384.5643	Durbin-Watson stat	2.471998
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 12 Hasil Uji Regresi data panel Fixed Effect Model

Sumber: Olah data eviews 12, 2022

$$Y = 42,35 + 2.81E-08 X_1 - 0,508x_2 + 2,76E-06x_3 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat di interpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta α pada regresi tersebut 42,35. Artinya apabila variabel-variabel independen bernilai 0. Maka nilai tingkat kemiskinan sebesar 42,35satuan.

2. Nilai koefisien regresi X1 investasi adalah 2.81E-08 atau 0,0000000281. Artinya apabila nilai variabel-variabel yang lain bersifat konstan, maka setiap kenaikan satu satuan nilai investasi maka diikuti dengan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,0000000281 satuan.
3. Nilai koefisien regresi X2 indeks pembangunan manusia sebesar -0,508. Artinya apabila nilai variabel-variabel yang lain bersifat konstan, maka setiap kenaikan satu satuan indeks pembangunan manusia terdapat penurunan tingkat kemiskinan sejumlah -0,508 satuan.
4. Nilai koefisien regresi X3 upah minimum regional sebesar 2,76E-06 atau 0,0000027. Artinya, apabila nilai variabel-variabel yang lain konstan, maka setiap kenaikan satu satuan upah minimum regional terdapat kenaikan tingkat kemiskinan sejumlah 0, 0000027 satuan.

Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t memeriksa apakah variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Jika dilihat dari nilai signifikansi, jika nilai signifikansi > 0.05 maka hipotesis ditolak, atau variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sementara jika nilai signifikansi < 0.05 maka hipotesis diterima, atau variabel independen berpengaruh pada variabel dependen.

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/18/22 Time: 22:13
Sample: 2018 2021
Periods included: 4
Cross-sections included: 32
Total panel (balanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.35413	12.00924	3.526795	0.0007
X1	2.81E-08	3.42E-08	0.822461	0.4129
X2	-0.508019	0.177188	-2.867115	0.0051
X3	2.76E-06	5.01E-07	5.505298	0.0000

Tabel 13 Uji T

Sumber: Olah data eviews 12, 2022

Hasil Uji T pada tabel 0.12 tersebut dapat diinterpretasikan dengan:

1. Variabel X1 terhadap Y atau variabel investasi terhadap tingkat kemiskinan mempunyai nilai signifikansi 0.4129 (lebih besar dari 0.05). Hal ini menyatakan bahwa variabel investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Variabel X2 Terhadap Y atau IPM terhadap tingkat kemiskinan mempunyai nilai signifikansi 0.0051 (lebih kecil dari 0.05). Hal ini menyatakan variabel IPM mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
3. Variabel X3 terhadap Y atau Upah Minimum Regional terhadap tingkat kemiskinan mempunyai nilai signifikansi 0.0000 (lebih kecil dari 0.05). Hal ini menyatakan variabel UMR berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Usai melakukan analisis regresi, didapatkan hasil bahwa secara bersama-sama variabel investasi, IPM, dan UMR berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Namun secara individual variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

1. Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Hipotesis pertama (H1) adalah variabel investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, hasil analisis regresi menyangkan variabel investasi (X1) mempunyai nilai signifikansi 0,4129. Angka ini lebih besar dari alfa ($0,4129 > 0,05$), maka nilai investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil berikut tidak sesuai dengan hipotesis peneliti.

Secara teori, semakin banyak investasi yang masuk ke suatu daerah maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan berkurang. Pernyataan ini dilandaskan pada teori oleh Sukirno. Menurutnyaa, investasi yang masuk ke

suatu daerah akan menambah kapital dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Dari stok kapital tersebut, investasi akan menaikkan penawaran, kemudian menaikkan output masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi perolehan kapital maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Peranan investasi pada tingkat kesejahteraan rakyat tersebut diperoleh dari tiga fungsi penting dari investasi⁹³:

1. Sebagai komponen penting dari pengeluaran agregat, kenaikan investasi akan diikuti peningkatan permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan kapasitas produksi yang disebabkan pertambahan barang dan modal dari investasi
3. Investasi selaku diikuti perkembangan teknologi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan studi terdahulu oleh Mustamin, dkk (2015). yang menyimpulkan tidak adanya pengaruh signifikan antara investasi terhadap kemiskinan. Ia menganalisis sebabnya karena investasi di dominasi oleh kaum menengah atas dimana tujuannya berfokus pada profit diri masing-masing sehingga tidak banyak memberi dampak pada kehidupan masyarakat miskin. Selain itu, penelitian Rahajeng, dkk⁹⁴ juga menyimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur periode 2009-2019. Penyebabnya diduga karena tidak meratanya sebaran wilayah investasi. Kurangnya daya saing antar wilayah menjadikan investasi hanya berpusat di wilayah sentral perekonomian dan perindustrian saja.

⁹³ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, and Sofyan Syahnur, "Investasi Dan Tenaga Kerja Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2013): 2–3.

⁹⁴ Rahajeng, Muljaningsih, and Asmara, "Engaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur."

Hasil serupa juga diungkapkan oleh Supratyoningih.⁹⁵ Investasi tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di provinsi Bali karena realisasi investasi hanya berpusat di wilayah Bali Selatan yang sektor pariwisatanya menarik. Sedangkan wilayah lain seperti Bali Utara, Barat, dan Timur belum mendapatkan manfaat penuh dari Investasi. Menurutnya, investasi yang berfokus pada satu sektor saja atau satu wilayah saja belum dapat memberi pengaruh signifikan pada pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali.

Realita yang hampir sama juga ditemukan di Provinsi Jawa Tengah. Dari 32 kabupaten/kota yang dijadikan sampel penelitian, ternyata sebaran investasi hanya berpusat di peringkat 10 besar kabupaten/kota dengan perolehan investasi terbanyak di Jawa Tengah. Untuk lebih detailnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tahun	Kabupaten/kota	Presentase total investasi
2018	Cilacap, Semarang, Brebes, Sragen, Semarang, Banyumas, Sukoharjo, Blora, Karanganyar, Jepara	84%
2019	Cilacap, Brebes, Semarang, Kudus, Jepara, Banyumas, Sukoharjo, Semarang, Demak, Banjarnegara,	87%
2020	Cilacap, Tegal, Semarang, Brebes, Grobogan, Kudus, Banjarnegara, Demak, Banyumas, Blora,	87%

⁹⁵ Lufi Supratyoningih and Ni Nyoman Yuliarmi, "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 01 (2022): 1, <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p01>. h. 10

2021	Cilacap, Semarang, Grobogan, Banyumas, Demak, Brebes, Karanganyar, Blora, Banjarnegara, Sukoharjo ,	76%
------	---	-----

Tabel 14 Presentase total investasi 10 besar kabupaten/kota di Jawa Tengah

Sumber: BPS.go.id (diolah)

Dari tabel 12, terlihat jika Cilacap pada tahun 2018-2021 secara konstan menempati peringkat pertama perolehan investasi tertinggi di Jawa Tengah. Dilansir dari Radar Banyumas, bahwa menurut DPMPT-SP Kabupaten Cilacap, Budi Santosa pencapaian investasi Cilacap tahun 2018 tidak terlepas dari banyaknya perusahaan multinasional di wilayah tersebut. Investasi periode tersebut di dominasi sektor listrik, dan gas. Sementara pada tahun 2021 investasi di Cilacap masih di dominasi industri besar seperti PLTU dan pertamina.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini ialah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi IPM sebesar -0,508 dengan nilai signifikansi 0.0051 (lebih kecil dari 0.05). Artinya, variabel IPM mempunyai pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima.

Berkurangnya tingkat kemiskinan karena Indeks Pembangunan Manusia ialah rambu-rambu yang membuktikan IPM mampu meningkatkan produktivitas kerja manusia. Kenaikan tersebut mempengaruhi peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.⁹⁶ Hasil studi ini menunjang penelitian sebelumnya oleh Suliswanto yang menyimpulkan IPM

⁹⁶ Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." H. 231

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Lebih jauh, studi suliswanto menyatakan variabel IPM pengaruhnya lebih dominan terhadap tingkat kemiskinan jika dibandingkan dengan variabel lain yang diteliti yakni PDRB.⁹⁷ Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang menyimpulkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di D.I Yogyakarta tahun 2010-2017.⁹⁸

Masalah pengentasan kemiskinan belum cukup jika hanya ditangani dengan pertumbuhan ekonomi yang mengharapkan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*).⁹⁹ Peningkatan kualitas SDM akan memberi pengaruh lebih nyata pada penurunan tingkat kemiskinan. Sebab, peningkatan kualitas SDM tidak lagi menangani masalah kemiskinan secara makro/negara melainkan secara individu ke individu. Konsep ini menjamin pemenuhan kebutuhan pokok serta memberi dorongan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

3. Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi upah minimum regional sebesar sebesar 2,76E-06 atau 0,0000027 dengan nilai signifikansi 0.0000 (lebih kecil dari 0.05). Artinya, variabel UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil berikut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan Upah minimum regional berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian sejalan dengan studi Ningrum (2017) yang menyimpulkan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Menurutnya, hubungan antara upah minimum dan kemiskinan positif wajar

⁹⁷ Suliswanto, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia." H. 364

⁹⁸ Suropto and Lalu Subayil, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 127. H.147

⁹⁹ Suliswanto, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia." H. 365

sebab mayoritas penduduk di Indonesia bekerja pada sektor informal dan adanya faktor biaya sosial inflasi.¹⁰⁰ Situasi serupa terjadi di Jawa Tengah, dimana mayoritas penduduk bekerja pada sektor informal. Untuk lebih detailnya tertera pada tabel di bawah:

Tahun	Formal	Informal
2018	39,33	60,67
2019	42,01	57,99
2020	37,25	62,75
2021	39,62	60,38

Tabel 15 Perbandingan Pekerja Sektor Formal dan Informal di Jawa Tengah (Persen)

Sumber: BPS.go.id (diolah)

Fakta dilapangan memperlihatkan kebijakan UMR memberi manfaat kepada sebagian kalangan saja, yakni para pekerja. Pun hanya pekerja yang tenaganya terus digunakan oleh perusahaan. Dengan adanya kenaikan UMR, pekerja aktif dapat meningkatkan daya beli dan mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Hasil penelitian juga searah dengan studi Woyanti (2013) yang menyampaikan variabel penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Menurutnya, ada dampak negatif yang menimpa pekerja ketika terjadi kenaikan upah, yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu rawan terjadi karena perusahaan tidak mampu membayar upah pekerja.¹⁰¹

Apabila ditilik dari sisi pemutusan hubungan kerja, PHK di Jawa Tengah tahun 2020 meledak bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pandemi covid 19 pengangguran mencapai 386.877 orang, meningkat drastis dari tahun sebelumnya yakni 18.911 orang. Jadi

¹⁰⁰ Ningrum, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015." H. 190

¹⁰¹ Nenek Woyanti, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan UMP Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Pra Dan Pasca Desentralisasi Fiskal," *Media Ekonomi Dan Manajemen* 28, no. 2 (2013): 28-43.

meskipun upah minimum naik, tetapi PHK meningkat, sehingga tingkat kemiskinan turut meningkat.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien 2.81E-08 dan signifikansi 0,4129 (lebih besar dari 0.05).
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021. Hal ini dapat dilihat dari Nilai koefisien regresi X2 indeks pembangunan manusia sebesar -0,508 (negatif) dan nilai signifikansi 0,0051 (lebih kecil dari 0.05)
3. Variabel Upah Minimum Regional mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2018-2021. Hal ini dapat dilihat dari Nilai koefisien regresi X3 upah minimum regional sebesar 2,76E-06 (positif) dan nilai signifikansi 0.00 (lebih kecil dari 0.05)
4. Variabel Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional secara bersama-sama berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2021. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung 384.5643 dengan probabilitas (F-statistik) 0.000000. Nilai probabilitasnya 0.000000 lebih kecil dari 0.05.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang relevan untuk masyarakat yang lebih luas. Pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pekerjaan karena menyangkut khalayak umum. Upaya-upaya itu

bisa dimulai dari hal-hal paling mendasar seperti pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar warga negara. Pemerintah tidak perlu menjadikan investasi sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi masyarakat. Sebaiknya pemerintah bisa fokus dalam menjamin ketersediaan lapangan kerja atau fasilitas penunjang yang bisa menyokong pendapatan masyarakat luas termasuk kalangan menengah ke bawah.

2. Bagi Masyarakat

Sudah saatnya masyarakat pandai membaca berbagai peluang di era modern ini. Persaingan yang ketat dalam pekerjaan bisa jadi pemicu semangat dalam bekerja. Dalam artian pengembangan kualitas diri harus sejalan dengan situasi perekonomian yang ada. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti etos kerja, motivasi, dan kreatifitas pada masing-masing individu. Selain itu, pengentasan kemiskinan juga bisa dimotori oleh masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan (berwirausaha) tanpa harus menunggu fasilitas lapangan kerja dari suatu perusahaan.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Bagi Penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk menambah atau mengganti variable-variabel lainnya yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Untuk: Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo (Anggota IKAPI), 2015.
- Aminah, Siti. "Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 4, no. 2 (2017): 119–30. <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/3587>.
- APRIANTO, NAERUL EDWIN KIKY. "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2018): 169–88. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. *Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sektoral Provinsi Jawa Tengah 2016-2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020.
- . "Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2022." *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022.
- Baeti, Nur. "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011." *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 3 (2013): 85–98. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1984>.
- Bhinadi, A. *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=b8hEDwAAQBAJ>.
- Cantika, Sri Budi. "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam." *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2014): 101. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>.
- Dilli Malianawati, S.H.S.H., and E Publishing. *Pemberian Upah Berlandaskan*

Nilai-Nilai Pancasila: Eternity Publishing. Eternity Publishing, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=j6QkEAAAQBAJ>.

Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E.M.M. *KONSEP DASAR INVESTASI DAN PASAR MODAL.* uwais inspirasi indonesia, n.d.
https://books.google.co.id/books?id=%5C_lbzDwAAQBAJ.

Febrianica, Danny Nur. “Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum,” 2015.

Gani, I, and S Amalia. *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi Dan Sosial.* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.

Ghofur, R A. *KONSEP UPAH DALAM EKONOMI ISLAM.* Arjasa Pratama, 2020.
<https://books.google.co.id/books?id=GLYHEAAAQBAJ>.

Gunawan, C. *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian New Edition Buku Untuk Orang Yang (Merasa) Tidak Bisa Dan Tidak Suka Statistika.* Yogyakarta: Deepublish, 2020.
<https://books.google.co.id/books?id=babXDwAAQBAJ>.

Hengki, Latan, and Selva Temalagi. *Analisis Multivariate Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal.* uwais inspirasi indonesia, n.d.

Hutajulu, Dinar Melani, Yustirania Septiani, and Jesika Melina Simamora. “Analisis Variabel Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 108. <https://doi.org/10.24269/iso.v5i1.636>.

Issn, Jurnal Ilmu-ilmu Agama. “Al-Mujaddid | Jurnal Ilmu-Ilmu Agama ISSN: 2655-271X” 1, no. 1 (2018): 19–31.

Jaya, I.M.L.M. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata.* Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

- Jenggawah, Negeri, Studi Pada, Keterampilan Berpikir, Kritis Dan, and Motivasi Belajar. *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Jember Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember*, 2010.
- Juanda, B. *Ekonometrika Deret Waktu: Teori Dan Aplikasi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.
- Kadji, Yulianto. “Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya” 113, no. 2 (2004): 180–90.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). “EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2015-2019,” 2017.
- Khomsan, A, A H Dharmawan, D Sukandar, and H Syarief. *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Atas kerja sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Komang, Ni, Meriyanti Jurusan, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. “Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014” 5 (2015). <https://media.neliti.com/media/publications/5350-ID-pengaruh-program-indeks-pembangunan-manusia-ipm-terhadap-pengentasan-kemiskinan.pdf>.
- Kurniawati, Ardhian, Beni Teguh Gunawan, and Disty Putri Ratna Indrasari. “Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014.” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen* 17, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.17970/jrem.17.170207.ID>.
- Kusumastuti, A, M P Ahmad Mustamil Khoiron, and M P Taofan Ali Achmadi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Lavenia Kotambunan, Sutomo Wim Palar, Richard L.H Tumilaar. “Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014).” *Jurnal*

Berkala Ilmiah Efisiensi 16, no. 01 (2016): 925–33.

Maipita, I. *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan*. Absolute Media, 2013.

Mukarramah, Cindy Yolanda, Muhammad Zulkarnain. “Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur.” *Jurnal Samudra Ekonomika* 3, no. 2 (2019).

Ningrum, Shinta Setya. “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15, no. 2 (2017).

Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, and Sofyan Syahnur. “Investasi Dan Tenaga Kerja Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2013): 2–3.

Nuritasari, Firdausi. “Pengaruh Infrastruktur, Pmdn Dan Pma Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia.” *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 4 (2013): 456–67. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3213>.

Pardiansyah, Elif. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

Pasaribu, Rowland B. F. “Investasi Dan Penanaman Modal.” *Investasi Dan Penanaman Modal*, no. 36 (2010): 235–78. <http://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/07-investasi-dan-penanaman-modal.pdf>.

PATEDA, YOLANDA -, Vecky A.J. Masinambow, and Tri Oldy Rotinsulu. “Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 3 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.35794/jpekd.16455.19.3.2017>.

- Prasetyoningrum, Ari Kristin. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>.
- Prawoto, Nano, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta Jalan, and Lingkar Selatan. “Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya.” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 9, no. 1 (2009): 56–68.
- Rahajeng, Amelia Sestu, Sri Muljaningsih, and Kiky Asmara. “Engaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 5 (2021).
- Ratih, Gusti Ayu Putu Ambara, Made Suyana Utama, and I Nyoman Mahaendra Yasa. “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali.” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 6, no. 1 (2017): 29–54.
- Ridwan, A M. *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. UIN-Maliki Press, 2011. <https://books.google.co.id/books?id=AnmknQEACAAJ>.
- Rifkhan. *Membaca Hasil Regresi Data Panel*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Rochmat Aldy Purnomo, S.E.M.S., and P C A S. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: CV. WADE GROUP bekerjasama dengan UNMUH Ponorogo Press, 2016.
- Safitri, Leli, and Muhammad Effendi. “Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Selatan.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 2, no. 4 (2019): 2019.

https://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf
%0A<http://www.ibm.com/support>%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0A[https://www.neps-data.de/Portals/0/Working Papers/WP_XLV.pdf](https://www.neps-data.de/Portals/0/Working%20Papers/WP_XLV.pdf)%0A<http://www2.psy>.

Samsul, Muhammad. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Gelora Aksara Pratama: 2006). h.46.

Santoso, D. *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*. Jaka: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Saputra, Whisnu Adhi. "Tingkat Kemiskinan." *Ekonomi Dan Bisnis*, 2011, 1–77. <http://eprints.undip.ac.id/28982/1/Skripsi018.pdf>.

Setiawan, Mohammad Bhakti, and Abdul Hakim. "Indeks Pembangunan Manusia Manusia." *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26 9(1) (2008): 18–26. [Uny.ac.id](http://www.uny.ac.id).

Setyawan, Ig. Dodiet Aditya. *Hipotesis Dan Variabel Penelitian*. Penerbit Tahta Media Group, 2021.

Sholihin, P M, and S E Puspita Ghaniy Anggraini. *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.

Sriyana, Jaka. "Reducing Regional Poverty Rate in Central Java." *Jejak* 11, no. 1 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i1.13272>.

Statistik, Badan Pusat, and Kabupaten Humbang Hasundutan. "Kabupaten Humbang Hasundutan," 2018, 46.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sulistiawati, Rini. "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Eksos* 8 (2012): 195–211.

Sulistiana, Indra. *PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA*

SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, Jurnal Akuntansi i. Vol 4 No. 2 Juli 2017: 65-74, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/252/314>.

Sulistyaningrum, A N, and L Muta'ali. "Analisis Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018." *Jurnal Bumi Indonesia*, 2020. <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/1210>.

Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. "Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia," 2010.

Supratyoningsih, Lufi, and Ni Nyoman Yuliarmi. "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 01 (2022): 1. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p01>.

Suripto, and Lalu Subayil. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 127.

Tan, I. *Bisnis Dan Investasi Sistem Syariah: Perbandingan Dengan Sistem Konvensional*. Universitas Atmajaya, 2009. <https://books.google.co.id/books?id=eQBhAQAACAAJ>.

Titioka, B M. *Kemiskinan Di Kota Ambon*. Jakarta Barat: Penerbit Adab, 2021.

"Upah Minimum Provinsi (UMP) Indonesia 2020 - Gajimu.Com," n.d.

Woyanti, Neni. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan UMP Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Pra Dan Pasca Desentralisasi Fiskal." *Media Ekonomi Dan Manajemen* 28, no. 2 (2013): 28-43.

Zubair, Muhammad kamal. “*OBLIGASI DAN SUKUK DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM (Suatu Kajian Perbandingan)*”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 46 No. I, Januari-Juni2012 271-296
[.http://www.asysyirah.uinsuka.com/index.php/AS/article/viewFile/40/40](http://www.asysyirah.uinsuka.com/index.php/AS/article/viewFile/40/40).

LAMPIRAN

1. Tabulasi data

Lampiran 1 tabulasi data

	Kabupaten / Kota	Tahun	Y (tingkat kemiskinan %)	X1 (Investasi) juta	X2 (IPM) %	X3 (UMK) %
1	Banjarnegara	2018	15.46	148632.2	66.54	1490000.0
	Banjarnegara	2019	14.76	168098.9	67.34	1610000.0
	Banjarnegara	2020	15.64	68649.5	67.45	1748000.0
	Banjarnegara	2021	16.23	115385.3	67.86	1805000.0
2	Banyumas	2018	13.5	615408.8	71.3	1589000.0
	Banyumas	2019	12.53	461788.2	71.96	1750000.0
	Banyumas	2020	13.26	1075232.9	71.98	1900000.0
	Banyumas	2021	13.66	998117.6	72.44	1970000.0
3	Batang	2018	8.69	1554043.7	67.86	1749900.0
	Batang	2019	8.35	1205058.7	68.42	1900000.0
	Batang	2020	9.13	866572.5	68.65	2061700.0
	Batang	2021	9.68	3500648.2	68.92	2129117.0
4	Blora	2018	11.9	17481.1	67.95	1564000.0
	Blora	2019	11.32	2768.8	68.65	1690000.0
	Blora	2020	11.96	282365.7	68.84	1834000.0
	Blora	2021	12.39	75171.7	69.37	1894000.0
5	Boyolali	2018	10.04	1128864.4	73.22	1651650.0
	Boyolali	2019	9.53	430282.9	73.8	1790000.0
	Boyolali	2020	10.18	714737.3	74.25	1942500.0
	Boyolali	2021	10.62	1073546.3	74.4	2000000.0
6	Brebes	2018	17.17	158753.3	65.68	1542000.0
	Brebes	2019	16.22	73808.6	66.12	1665850.0
	Brebes	2020	17.03	124921.5	66.11	1807614.0
	Brebes	2021	17.43	548421.3	66.32	1866723.0
7	Cilacap	2018	11.25	4814414.7	69.56	1841209.0
	Cilacap	2019	10.73	6847557.7	69.98	1989058.08
	Cilacap	2020	11.46	4287706.1	69.95	2158327.0
	Cilacap	2021	11.67	1557392.7	70.42	2228904.0
8	Demak	2018	12.54	485344.8	71.26	2065490.0
	Demak	2019	11.86	526094.4	71.87	2240000.0
	Demak	2020	12.54	976924.8	72.22	2432000.0
	Demak	2021	12.92	2573023.4	72.57	2511526.0
9	Grobogan	2018	12.31	258461.1	69.32	1560000.0
	Grobogan	2019	11.77	413749.6	69.86	1685500.0
	Grobogan	2020	12.46	3507281.3	69.87	1830000.0

10	Grobogan	2021	12.74	4154273.2	70.41	1890000.0
	Jepara	2018	7.00	924152.4	71.38	1739360.0
	Jepara	2019	6.66	1451996.00	71.88	1879031.0
	Jepara	2020	7.17	405240.4	71.99	2040000.0
11	Jepara	2021	7.44	527294.7	72.36	2107000.0
	Karanganyar	2018	10.01	996557.7	75.54	1696000.0
	Karanganyar	2019	9.55	274773.6	75.89	1833000.0
	Karanganyar	2020	10.28	191929.5	75.86	1989000.0
12	Karanganyar	2021	10.68	1235054.5	75.99	2054040.0
	Kendal	2018	9.84	372193.3	71.28	1929458.0
	Kendal	2019	9.41	154657.1	71.97	2084393.48
	Kendal	2020	9.99	266922.1	72.29	2261775.0
13	Kendal	2021	10.24	783311.3	72.5	2335735.0
	Klaten	2018	12.96	232879.9	74.79	1661632.35
	Klaten	2019	12.28	215485.6	75.29	1795061.43
	Klaten	2020	12.89	45956.1	75.56	1947821.16
14	Klaten	2021	13.49	134098.0	76.12	2011515.0
	Kudus	2018	6.98	687301.7	74.58	1892500.0
	Kudus	2019	6.68	2042526.3	74.94	2044467.75
	Kudus	2020	7.31	1921363.9	75.0	2218451.95
15	Kudus	2021	7.6	721370.2	75.16	2290995.0
	Magelang	2018	11.23	128213.3	69.11	1742000.0
	Magelang	2019	10.67	193927.4	69.87	1882000.0
	Magelang	2020	11.27	197315.4	69.87	2042200.0
16	Magelang	2021	11.91	309401.1	70.12	2075000.0
	Pati	2018	9.9	106331.3	70.71	1585000.0
	Pati	2019	9.46	227515.7	71.35	1742000.0
	Pati	2020	10.08	189302.1	71.77	1891000.0
17	Pati	2021	10.21	268438.4	72.28	1953000.0
	Pemalang	2018	16.04	104509.9	65.67	1588000.0
	Pemalang	2019	15.41	53843.7	66.32	1718000.0
	Pemalang	2020	16.02	111134.0	66.32	1865000.0
18	Pemalang	2021	16.56	242282.3	66.56	1926000.0
	Purbalingga	2018	15.62	21462.0	68.41	1655200.0
	Purbalingga	2019	15.03	53081.1	68.99	1788500.0
	Purbalingga	2020	15.9	137971.5	68.97	1940800.0
19	Purbalingga	2021	16.24	586584.3	69.15	1988000.0
	Rembang	2018	15.41	444458.1	69.46	1535000.0
	Rembang	2019	14.95	251622.2	70.15	1660000.0
	Rembang	2020	15.6	238070.3	70.02	1802000.0
20	Rembang	2021	15.8	181470.4	70.43	1861000.0
	Semarang	2018	7.29	2160748.8	73.61	1900000.0

	Semarang	2019	7.04	568832.5	74.14	2055000.0
	Semarang	2020	7.51	578954.3	74.1	2229880.5
	Semarang	2021	7.82	636873.1	74.24	2302798.0
21	Sragen	2018	13.12	2446584.9	72.96	1546492.72
	Sragen	2019	12.79	35596.6	73.43	1673500.0
	Sragen	2020	13.38	123651.1	73.95	1815914.85
22	Sragen	2021	13.83	620931.5	74.08	1829500.0
	Sukoharjo	2018	7.41	1160833.1	76.07	1648000.0
	Sukoharjo	2019	7.14	926538.9	76.84	1783500.0
23	Sukoharjo	2020	7.68	444570.0	76.98	1938000.0
	Sukoharjo	2021	8.23	863819.5	77.13	1986450.0
	Tegal	2018	7.94	72962.0	67.33	1617000.0
24	Tegal	2019	7.64	54366.7	68.24	1747000.0
	Tegal	2020	8.14	7586941.9	68.39	1896000.0
	Tegal	2021	8.6	218013.5	68.79	1958000.0
25	Temanggung	2018	9.87	102484.4	68.83	1557000.0
	Temanggung	2019	9.42	7777.6	69.56	1682027.1
	Temanggung	2020	9.96	33536.2	69.57	1825200.0
26	Temanggung	2021	10.17	161010.0	69.88	1885000.0
	Wonogiri	2018	10.75	42690.9	69.37	1542000.0
	Wonogiri	2019	10.25	59626.7	69.98	1655000.0
27	Wonogiri	2020	10.86	46988.8	70.25	1797000.0
	Wonogiri	2021	11.55	345718.6	70.49	1827000.0
	Wonosobo	2018	17.58	16126.8	67.81	1585000.0
28	Wonosobo	2019	16.63	14715.3	68.27	1712500.0
	Wonosobo	2020	17.36	9280.9	68.22	1859000.0
	Wonosobo	2021	17.67	226748.7	68.43	1920000.0
29	Magelang	2018	7.87	13024.4	78.31	1580000.0
	Magelang	2019	7.46	25772.8	78.8	1707000.0
	Magelang	2020	7.58	31305.1	78.99	1853000.0
30	Magelang	2021	7.75	289183.4	79.43	1914000.0
	Pekalongan	2018	6.75	96720.0	74.24	1765178.63
	Pekalongan	2019	6.6	24344.3	74.77	1906922.47
29	Pekalongan	2020	7.17	27069.2	74.98	2072000.0
	Pekalongan	2021	7.59	411126.5	75.4	2139754.0
	Salatiga	2018	4.84	131610.5	82.41	1735930.06
30	Salatiga	2019	4.76	38022.1	83.12	1875325.24
	Salatiga	2020	4.94	103234.0	83.14	2034915.42
	Salatiga	2021	5.14	176223.3	83.6	2101457.0
30	Semarang	2018	4.14	8580759.5	82.72	2310087.5
	Semarang	2019	3.98	4170216.1	83.19	2498587.53
	Semarang	2020	4.34	6744646.1	83.05	2715000.0

31	Semarang	2021	4.56	8587314.5	83.55	2810025.0
	Surakrta	2018	9.08	383388.2	81.46	1668700.0
	Surakarta	2019	8.7	213307.7	81.86	1802700.0
	Surakarta	2020	9.03	394194.8	82.21	1956200.0
	Surakarta	2021	9.4	154887.6	82.62	2013810.0
32	Tegal	2018	7.81	14563.0	74.44	1630500.0
	Tegal	2019	7.47	36918.8	74.93	1762000.0
	Tegal	2020	7.8	47734.4	75.07	1925000.0
	Tegal	2021	8.12	200952.9	75.52	1982750.0

2. Pemilihan model Estimasi regresi data panel

Lampiran 2 Hasil Uji Regresi Common Effect Model (CEM)

CEM

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/18/22 Time: 22:09				
Sample: 2018 2021				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 32				
Total panel (balanced) observations: 128				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.12598	3.626500	13.27064	0.0000
X1	-2.49E-07	1.51E-07	-1.648865	0.1017
X2	-0.491256	0.052632	-9.333836	0.0000
X3	-8.11E-07	1.12E-06	-0.725485	0.4695
R-squared	0.503925	Mean dependent var	10.72820	
Adjusted R-squared	0.491923	S.D. dependent var	3.456770	
S.E. of regression	2.463968	Akaike info criterion	4.672174	
Sum squared resid	752.8210	Schwarz criterion	4.761300	
Log likelihood	-295.0192	Hannan-Quinn criter.	4.708387	
F-statistic	41.98744	Durbin-Watson stat	0.085950	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3 Hasil Uji Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/18/22 Time: 22:13
 Sample: 2018 2021
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 32
 Total panel (balanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.35413	12.00924	3.526795	0.0007
X1	2.81E-08	3.42E-08	0.822461	0.4129
X2	-0.508019	0.177188	-2.867115	0.0051
X3	2.76E-06	5.01E-07	5.505298	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.992938	Mean dependent var	10.72820	
Adjusted R-squared	0.990356	S.D. dependent var	3.456770	
S.E. of regression	0.339476	Akaike info criterion	0.904618	
Sum squared resid	10.71770	Schwarz criterion	1.684470	
Log likelihood	-22.89557	Hannan-Quinn criter.	1.221476	
F-statistic	384.5643	Durbin-Watson stat	2.471998	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	207.722733	(31,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	544.247158	31	0.0000

Lampiran 5 Hasil Uji Regresi Random Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/18/22 Time: 22:23
Sample: 2018 2021
Periods included: 4
Cross-sections included: 32
Total panel (balanced) observations: 128
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.23354	5.960493	7.588893	0.0000
X1	2.04E-08	3.40E-08	0.600669	0.5492
X2	-0.548956	0.087727	-6.257543	0.0000
X3	2.81E-06	3.14E-07	8.938589	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.456306	0.9813
Idiosyncratic random		0.339476	0.0187

Weighted Statistics			
R-squared	0.385257	Mean dependent var	0.739587
Adjusted R-squared	0.370384	S.D. dependent var	0.437882
S.E. of regression	0.347452	Sum squared resid	14.96961
F-statistic	25.90346	Durbin-Watson stat	1.742924
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.406144	Mean dependent var	10.72820
Sum squared resid	901.2098	Durbin-Watson stat	0.028951

Lampiran 6 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.894825	3	0.0307

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.000000	0.000000	0.000000	0.0323
X2	-0.508019	-0.548956	0.023700	0.7903
X3	0.000003	0.000003	0.000000	0.8945

3. Uji asumsi klasik

Lampiran 7 Hasil Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESIDUAL)

Method: Panel Least Squares

Date: 12/18/22 Time: 22:46

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.747369	0.232582	3.213359	0.0017
X1	1.21E-08	9.67E-09	1.252003	0.2129
X2	-0.003977	0.003375	-1.178177	0.2410
X3	-1.21E-07	7.17E-08	-1.684454	0.0946

R-squared	0.049382	Mean dependent var	0.241421
Adjusted R-squared	0.026383	S.D. dependent var	0.160151
S.E. of regression	0.158024	Akaike info criterion	-0.821387
Sum squared resid	3.096480	Schwarz criterion	-0.732261
Log likelihood	56.56877	Hannan-Quinn criter.	-0.785175
F-statistic	2.147156	Durbin-Watson stat	2.701199
Prob(F-statistic)	0.097684		

Lampiran 8 Hasil Uji Multikoleniaritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.214977	0.490129
X2	0.214977	1.000000	0.405177
X3	0.490129	0.405177	1.000000

Uji ketetapan model

Lampiran 9 Hasil Uji F

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992938	Mean dependent var	10.72820
Adjusted R-squared	0.990356	S.D. dependent var	3.456770
S.E. of regression	0.339476	Akaike info criterion	0.904618
Sum squared resid	10.71770	Schwarz criterion	1.684470
Log likelihood	-22.89557	Hannan-Quinn criter.	1.221476
F-statistic	384.5643	Durbin-Watson stat	2.471998
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10 Hasil Uji F

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992938	Mean dependent var	10.72820
Adjusted R-squared	0.990356	S.D. dependent var	3.456770
S.E. of regression	0.339476	Akaike info criterion	0.904618
Sum squared resid	10.71770	Schwarz criterion	1.684470
Log likelihood	-22.89557	Hannan-Quinn criter.	1.221476
F-statistic	384.5643	Durbin-Watson stat	2.471998
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 11 Uji T

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/18/22 Time: 22:13
 Sample: 2018 2021
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 32
 Total panel (balanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.35413	12.00924	3.526795	0.0007
X1	2.81E-08	3.42E-08	0.822461	0.4129
X2	-0.508019	0.177188	-2.867115	0.0051
X3	2.76E-06	5.01E-07	5.505298	0.0000

Lampiran 12 Hasil Uji Regresi data panel Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/18/22 Time: 22:13
 Sample: 2018 2021
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 32
 Total panel (balanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.35413	12.00924	3.526795	0.0007
X1	2.81E-08	3.42E-08	0.822461	0.4129
X2	-0.508019	0.177188	-2.867115	0.0051
X3	2.76E-06	5.01E-07	5.505298	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992938	Mean dependent var	10.72820
Adjusted R-squared	0.990356	S.D. dependent var	3.456770
S.E. of regression	0.339476	Akaike info criterion	0.904618
Sum squared resid	10.71770	Schwarz criterion	1.684470
Log likelihood	-22.89557	Hannan-Quinn criter.	1.221476
F-statistic	384.5643	Durbin-Watson stat	2.471998
Prob(F-statistic)	0.000000		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahyar Manarul Hidayay Fatah
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 14 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : RT 02/RW 01 Desa Pamedaran, Kec. Ketanggungan,
Kab. Brebes.
Nama Ayah : Dulhadi
Nama Ibu : Mimin
No telp : 083863586559
Email : ahyarmanarul99@gmail.com

Riwayat pendidikan

1. SDN Pamedaran 02 Brebes, Lulus Tahun 2010
2. MTs Al-Adhhar Cikeusal Kidul Brebes, Lulus Tahun 2013
3. MA Zainurrahman Cikeusal Lor Brebes, Lulus Tahun 2016